



**PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN
ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DAN DANA
ALOKASI KHUSUS, TERHADAP BELANJA
MODAL DI PEMERINTAHAN KOTA
KABUPATEN DI SUMATERA
UTARA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi**

Oleh :

**BEBY AGUSTIAN ZEBUA
NPM 1515100566**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2020**



**FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
M E D A N**

PENGESAHAN SKRIPSI

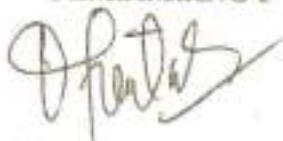
N A M A : BEBY AGUSTIAN ZEBUA
NPM : 1515100566
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
JENJANG : S I (STRATA SATU)
JUDUL SKRIPSI : PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI,
PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI
UMUM, DAN DANA ALOKASI KHUSUS, TERHADAP
BELANJA MODAL DI PEMERINTAHAN KOTA
KABUPATEN DI SUMATERA UTARA

Medan, Juli 2020

KETUA PROGRAM STUDI

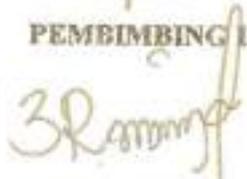

Junawan, SE., M.Si

PEMBIMBING I


Dr. Oktarini Khamilah Siregar, SE., M.Si


DEKAN
UNDIP
17061
Dr. Surya Nita SH., M.Hum

PEMBIMBING II


Rusyda Nazhirah Yunus, SS., M.Si



**FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
M E D A N**

SKRIPSI DITERIMA DAN DISETUJUI OLEH PANITIA UJIAN SARJANA
PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

PERSETUJUAN UJIAN

N A M A : BEBY AGUSTIAN ZEBUA
NPM : 1515100566
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
JENJANG : S 1 (STRATA SATU)
JUDUL SKRIPSI : PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI,
PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI
UMUM, DAN DANA ALOKASI KHUSUS, TERHADAP
BELANJA MODAL DI PEMERINTAHAN KOTA
KABUPATEN DI SUMATERA UTARA

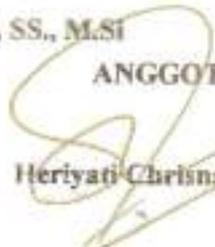
Medan, Juli 2020

KETUA

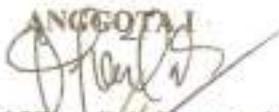

Junawan, SE., M.Si
ANGGOTA II


Rusyda Nazhirah Yunus, SS., M.Si

ANGGOTA IV


Heriyati Chrisna, SE., M.Si

ANGGOTA I


Dr. Oktarini Khamillah Siregar, SE., M.Si
ANGGOTA III


Irawan, SE., M.Si

SURAT PERNYATAAN

Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :

Nama : Beby Agustian Zebua
P. M : 1515100566
Tempat/Tgl. Lahir : Sinarikhi / 15 Agustus 1995
Alamat : Jl. Lembaga Perumahan Gang Rambutan no.9
No HP : 082367133749
Nama Orang : Batasi Zebua/Budiria Mendrofa
Keahlian : SOSIAL SAINS
Program Studi : Akuntansi
Judul : Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus, terhadap Belanja Modal di Pemerintahan Kota Kabupaten di Sumatera Utara

Dengan surat ini menyatakan dengan sebenar - benarnya bahwa data yang tertera diatas adalah sudah benar sesuai dengan ijazah pada pendidikan terakhir yang saya jalani. Maka dengan ini saya tidak akan melakukan penuntutan kepada MB. Apabila ada kesalahan data pada ijazah saya.

Sehingga surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar - benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan dibuat dalam keadaan sadar. Jika terjadi kesalahan, Maka saya bersedia bertanggung jawab atas kelalalan saya.

Medan, 06 Juni 2020

Membuat Pernyataan





UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI FAKULTAS SOSIAL SAINS

Fakultas Ekonomi UNPAB, Jl. Jend. Gatot Subroto Km, 4,5 Medan Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap	: BEBY AGUSTIAN ZEBUA
Tempat/Tgl. Lahir	: SINARIKHI / 15 Agustus 1995
Nomor Pokok Mahasiswa	: 1515100566
Program Studi	: Akuntansi
Konsentrasi	: Akuntansi Sektor Publik
Jumlah Kredit yang telah dicapai	: 122 SKS, IPK 3.09
Nomor Hp	: 082367133749
Dengan ini mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut :	

No.	Judul
1.	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Modal (Studi Kasus Pemerintahan Kota/Kabupaten Di Sumatera Utara)

Isian : Diisi Oleh Dosen Jika Ada Perubahan Judul

Isian Yang Tidak Perlu

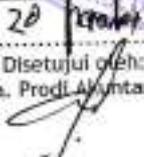

 (Ir. Bhakti Alarasyah, M.T., Ph.D.)

Medan, 23 April 2019

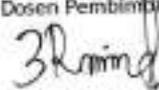
Pemohon,

 (Beby Agustian Zebua)

Tanggal :
 Disahkan oleh :
 Dekan

 (Dr. Surya Nida S.H., M.Hum.)
 Tanggal : 20 April 2019
 Disetujui oleh :
 Ka. Prodi Akuntansi

 (Anggi Pratama Nasution, SE., M.Si)

Tanggal : 25-3-2019
 Disetujui oleh :
 Dosen Pembimbing I :

 (Oktarini Kurniah Siragan, SE., M.Si)
 Tanggal : 24-4-2019
 Disetujui oleh :
 Dosen Pembimbing II :

 (RUSYDA NAZHIRAH YUNUS, SS., M.Si)

No. Dokumen: FM-UPBM-18-02	Revisi: 0	Tgl. Eff: 22 Oktober 2018
----------------------------	-----------	---------------------------



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Dosen Pembimbing I : Oktarini Khamilah, Sragar, SE., M.Si
 Dosen Pembimbing II : Rusyda Nazhirah Yunus, SS., M.Si
 Nama Mahasiswa : BEBY AGUSTIAN ZEBUA
 Jurusan/Program Studi : Akuntansi
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1515100566
 Bidang Pendidikan :
 Judul Tugas Akhir/Skripsi :

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
29 oktober 2019	Perbaiki Kata Pengantar Buat Halaman di kt-pengantar dan Daftar isi. Perbaiki Daftar isi Semua kutipan yang ada di BAB I, II dan III harus ada di daftar pustaka. Perbaiki Tabel di BAB I Buat Tahapnya di Peneliti Terdahulu. Defenisi operasional perbaiki perbaiki Daftar Pustaka		
14 Nov. 2019	Perbaiki daftar isi Perbaiki Daftar pustaka Indikator di Bab I harus ada Data nya di Daftar pustaka.		

Dosen Pembimbing I

RUSYDA NAZHIRAH YUNUS

27 Nov 2019 Perbaiki daftar pustaka
 All seminar proposal



Medan, 17 September 2019
 Diketahui/Ditetujui oleh :
 Dekan
 Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpub@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Dosen Pembimbing I : Oktarini Khamilah Siregar, SE., M.Si
 Dosen Pembimbing II : Rusyda Nazhirah Yunus, SS., M.Si
 Nama Mahasiswa : BEBY AGUSTIAN ZEBUA
 Jurusan/Program Studi : Akuntansi
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1515100566
 Bidang Pendidikan :
 Jenis Tugas Akhir/Skripsi :

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
09-2019	Perbaiki Identifikasi masalah, latar belakang masalah, rumusan masalah dan hipotesis. Teori & variabel penelitian di lengkapi, kerangka konseptual & dijelaskan (kalimatnya, buat tabel waktu penelitian dan definisi operasional, dan teknik analisis data & sesuaikan dgn teori		
10-2019	Perbaiki Identifikasi, Rumusan, tujuan latar belakang masalah, hipotesis. Keastlian tabel peneliti terdahulu, kerangka konseptual & sampel,		
10-2019	Perbaiki latar belakang masalah, Identifikasi sampel, definisi operasional & kerangka konseptual & jelaskan		

Acc & Seminar proposal

Dosen Pembimbing I

Oktarini Khamilah Siregar, SE., M.Si

Medan, 17 September 2019
 Diketahui/Ditetujui oleh :
 Dekan



Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpub@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Pembimbing I : Oktarini Khamilah Singpr, SE., M.Si
 Pembimbing II : Lusya Nazhirah Yunus, SS., M.Si
 Nama Mahasiswa : BEBY AGUSTIAN ZEBUA
 Jurusan/Program Studi : Akuntansi
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1515100566
 Bidang Pendidikan :
 Tugas Akhir/Skripsi :

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
2-2020	Pembahasan Identifikasi masalah di paragraf di latar belakang masalah, Bab 3 di terangkan analisis data, Hasil penelitian di paragraf deskripsi statistik, uji normalitas, dan Heteroskedastisitas, Pembahasan, Kesimpulan.	<i>[Signature]</i>	
2-2020	Pembahasan Identifikasi di latar belakang masalah, pembahasan hasil penelitian uji asumsi klasik dan uji hipotesis, pembahasan, Kata pengantar dan Abstrak.	<i>[Signature]</i>	
3-2020	Pembahasan dan paragraf latar belakang masalah & pembahasan serta kesimpulan Ace & Bidang meja hijau	<i>[Signature]</i>	

Pembimbing I
[Signature]
 Oktarini Khamilah Singpr (SE, M.Si)

Medan, 18 Februari 2020
 Diketahui/Disetujui oleh :
 Dekan,

[Signature]
 Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpad@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Dosen Pembimbing I : Oktarina Khamilah Siregar, SE., M.Si
 Dosen Pembimbing II : Rusyda Nazhirah Yunus, SS., M.Si
 Nama Mahasiswa : BEBY AGUSTIAN ZEBUA
 Jurusan/Program Studi : Akuntansi
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1515100566
 Bidang Pendidikan :
 Jenis Tugas Akhir/Skripsi :

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
Februari 2020	<ul style="list-style-type: none"> - Cover - Daftar isi, Daftar tabel, Daftar gambar - Data dan sumber data - Ukuran kertas - penulisan judul tabel 		
Maret 2020	Daftar isi Daftar Tabel Daftar Gambar. Revisi Daftar Pustaka - i - Kesimpulan - ii - penulisan - a -		
April 2020	Sistematika Penulisan ACC		

Medan, 18 Februari 2020
 Diketahui/Ditetujui oleh :
 Dekan,

Dr. Surya Nita, S.P., M.Hum.

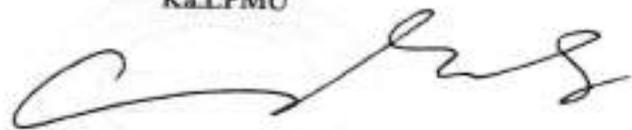
SURAT KETERANGAN PLAGIAT CHECKER

Dengan ini saya Ka.LPMU UNPAB menerangkan bahwa surat ini adalah bukti pengesahan dari LPMU sebagai pengesah proses plagiat checker Tugas Akhir/ Skripsi/Tesis selama masa pandemi *Covid-19* sesuai dengan edaran rektor Nomor : 7594/13/R/2020 Tentang Pemberitahuan Perpanjangan PBM Online.

Demikian disampaikan.

WB: Segala penyalahgunaan/pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku UNPAB.

Ka.LPMU

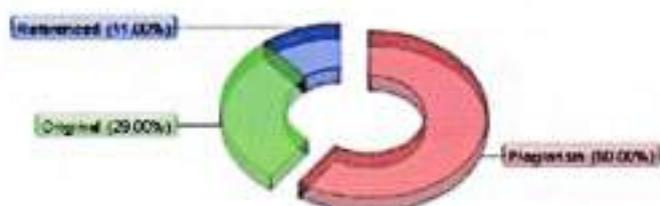


Cahyo Pramono, SE.,MM

Plagiarism Detector v. 1460 - Originality Report 06/02/20 10:02:10

EBY AGUSTIAN ZEBUA_1515100566_AKUNTANSI.docx Licensed to: Universitas Pembangunan Panca Budi_License03
Comparison Preset: Rewrite. Detected language: Indonesian [detected_string] [detected_language]

Relation chart



Distribution graph



Top sources of plagiarism

Rank	Words	Source URL
1	145	20902 http://jurnal.unmah.ac.id/wp-content/uploads/primary_forma1_e051c9a220e029909...
2	137	18035 http://lib.unma.ac.id/27121/1/7211411078%20a.pdf
3	127	17378 https://id.123ook.com/doc/unduh%20lay-pengantar-pendidikan-akhir-darrah-dana-in...

**baga Penjaminan Mutu Universitas.
Pembangunan Panca Budi
tot Subroto km 4,5 Medan
budi.ac.id**



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
Jl. Jend. Gatot Subroto KM. 4,5 Medan Sunggal, Kota Medan Kode Pos 20122

SURAT BEBAS PUSTAKA
NOMOR: 2032/PERP/BP/2020

Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi menerangkan bahwa berdasarkan data pengguna perpustakaan saudara/i:

: Beby Agustian Zebua
: 1515100566
Semester : Akhir
: SOSIAL SAINS
Prodi : Akuntansi

nya terhitung sejak tanggal 04 Juni 2020, dinyatakan tidak memiliki tanggungan dan atau pinjaman buku sekaligus terdaftar sebagai anggota Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Medan, 04 Juni 2020
Diketahui oleh,
Kepala Perpustakaan,

Muhammad Muttaqin, S. Kom., M.Kom.

Revisi : 01 Tgl. Efektif : 04 Juni 2015

Hal : Permohonan Meja Hijau

Medan, 06 Juni 2020
 Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
 Fakultas SOSIAL SAINS
 UNPAB Medan
 Di -
 Tempat

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Beby Agustian Zebua
 Tempat/Tgl. Lahir : Sinarikhi / 15 Agustus 1995
 Nama Orang Tua : Batasi Zebua
 N. P. M : 1515100566
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Program Studi : Akuntansi
 No. HP : 082367133749
 Alamat : Jl. Lembaga Perumahan Gang Rambutan no.9

Sebagai mahasiswa yang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus, terhadap Belanja Modal di Pemerintahan Kota Kabupaten di Sumatera Utara, Selanjutnya saya menyatakan :

- Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
- Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indek prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
- Telah tercapai keterangan bebas pustaka
- Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
- Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
- Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
- Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
- Skripsi sudah dijiilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjiilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan
- Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
- Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
- Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
- Bersedia melunaskan biaya-biaya yang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan perincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	500,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,500,000
3. [202] Bebas Pustaka	: Rp.	100,000
4. [221] Bebas LAB	: Rp.	
Total Biaya	: Rp.	2,100,000

Periode Wisuda Ke : **65**

Ukuran Toga : **M**

Diketahui/Disetujui oleh :

Hormat saya



Surya Nita, S.H., M.Hum.
 Dekan Fakultas SOSIAL SAINS



Beby Agustian Zebua
 1515100566

Daftar :

- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila :
 - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
 - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Mhs.ybs.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : BEBY AGUSTIAN ZEBUA
NPM : 1515100566
Prodi : AKUNTANSI
JudulSkripsi : PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI,
PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI
UMUM, DAN DANA ALOKASI KHUSUS, TERHADAP
BELANJA MODAL DI PEMERINTAHAN KOTA
KABUPATEN DI SUMATERA UTARA

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tugas Akhir/Skripsi saya bukan hasil Plagiat
2. Saya tidak akan menuntut perbaikan nilai indeks Prestasi Kumulatif (IPK) setelah ujian Sidang Meja Hijau
3. Skripsi saya dapat dipublikasikan oleh pihak lembaga, dan saya tidak akan menuntut akibat publikasi tersebut

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenar-benarnya, terima kasih

Medan, 2 Juni 2020

Yang membuat pernyataan



Bebby Agustian Zebua
BEBY AGUSTIAN ZEBUA

ABSTRAK

Belanja modal adalah pengeluaran pemerintah Kota/Kabupaten untuk menambah aset tetap yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat misalnya dalam pembangunan infrastruktur. Penelitian ini melakukan dengan metode studi dokumentasi dilakukan untuk mendukung data skunder. Seperti data perusahaan/lembaga laporan keuangan dan lainnya. Data dokumen biasanya langsung berbentuk kuantitatif. Berdasarkan hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa PDRB dan DAK berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal sedangkan PAD dan DAU tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal di Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara. PDRB, PAD, DAU dan DAK secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal pada Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara. Nilai *adjusted R square* adalah 34.9% artinya variasi Belanja Modal (Y) dapat dijelaskan oleh variasi variabel PDRB, PAD, DAU dan DAK. Sedangkan sisanya sebesar 66.1% dipengaruhi variabel lain yang tidak dimasukkan kedalam model atau tidak diteliti yaitu variabel retribusi daerah, pajak daerah, rasio kemandirian dan penganguran.

Kata Kunci: PDRB (Produk Domestik Regional Bruto), Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal

ABSTRACT

Capital expenditure is the expenditure of the City / Regency government to add fixed assets aimed at the welfare of the community for example in infrastructure development. This study conducted a documentation study method carried out to support secondary data. Such as company data / financial statement institutions and others. Document data is usually directly quantitative. Based on the results of research partially shows that the GRDP and DAK have a significant effect on capital expenditure while the PAD and DAU have no significant effect on capital expenditure in the Government of North Sumatra Province. GRDP, PAD, DAU and DAK simultaneously have a significant effect on capital expenditure in the Government of North Sumatra Province. The adjusted R square value is 34.9% meaning that the variation of Capital Expenditures (Y) can be explained by variations in GRDP, PAD, DAU and DAK variables. While the remaining 66.1% is influenced by other variables that are not included in the model or not examined, namely the variable levies, local taxes, the ratio of independence and unemployment.

Keywords: *Gross Regional Domestic Product (GRDP), Local Own Revenue, General Allocation Funds, Special Allocation Funds and Capital Expenditures*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Akuntansi di Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Pancabudi Medan, dengan judul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus di Pemerintahan Kota Kabupaten Di Sumatera Utara”

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak mendapat dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada

1. Bapak Dr. Muhammad Isa Indrawan SE, MM selaku Rektor Universitas Pembangunan Pancabudi Medan.
2. Ibu Dr. Surya Nita SH., M.Hum Selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Pancabudi Medan.
3. Junawan, SE.,M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Pancabudi.
4. Oktarini Khamilah Siregar, SE., M.Si Selaku Pembimbing I (satu) yang telah memberikan bimbingan, petunjuk, motivasi sehingga skripsi dapat terselesaikan dengan baik.
5. Rusyda Nazhirah Yunus, SS., M.Si Selaku Pembimbing II (dua) yang telah memberikan bimbingan, petunjuk, motivasi sehingga skripsi dapat terselesaikan dengan baik.

6. Khususnya kepada Ayahanda Batasi Zebua dan Ibunda Budiria Mendrofa yang tersayang dan terkasih, kakak dan adik yang tidak putus memanjatkan doa kepada tuhan yang maha kuasa, semangat dan dukungan moral maupun material demi kesuksesan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada seluruh dosen bapak dan ibu staf pengajar di Fakultas Sains Universitas Pemabangunan Pancabudi Medan yang telah membimbing penulis selama mengikuti pendidikan, serta kepada seluruh staf pegawai di Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Pancabudi Medan.
8. Teman-teman seperjuangan yang sama-sama berjuang dalam menyelesaikan pendidikan untuk memperoleh gelar sarjana Akuntansi Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Pancabudi.

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh kesempurnaan, untuk itu penulis mengharpkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat menjadi sumbangan yang berarti bagi ilmu pengetahuan pada umumnya dan Akuntansi pada akhirnya

Medan, 2020
Penulis

Beby Agustian Zebua

DAFTAR ISI

Abstrak	
Abstract	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	5
1.2. Identifikasi Masalah	6
1.3. Batasan Masalah.....	6
1.4. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	6
1.4.1. Tujuan Penelitian.....	7
1.4.2. Manfaat Penelitian.....	7
1.5. Keaslian Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1. Landasan Teoritis.....	10
2.2. Penelitian Sebelumnya.....	22
2.3. Kerangka Konseptual.....	24
2.4. Hipotesis	29
BAB III METODE PENELITIAN	30
3.1. Pendekatan Penelitian	30
3.2. Lokasi Dan Waktu Penelitian	30
3.3. Populasi dan Sampel/Jenis dan Sumber Data	31
3.3.1. Populasi	31
3.3.2. Sampel	31
3.4. Variabel Penelitian Dan Defenisi Operasional	32
3.4.1. Variabel Penelitian	32
3.4.2. Defensi Operasional	33
3.5. Teknik Pengumpulan Data.....	33
3.6. Teknik Analisa Data.....	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
4.1. Deskripsi Objek Penelitian	39
4.1.1. Sejarah Lokasi Penelitian	39
4.1.2. Visi dan Misi	42
4.2. Hasil Penelitian	43
4.2.1. Statistik Deskriptif.....	43
4.2.2. Uji Normalitas	45
4.2.3. Uji Heteroskedastitas	47
4.2.4. Uji Auto Korelasi	48
4.2.5. Uji Multikolineritas	48
4.2.6. Pengujian <i>Good Of Lift</i>	49
4.3. Pembahasan.....	54

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	65
4.4. Kesimpulan	65
4.5. Saran	65

Daftar Pustaka
Lampiran
Biodata

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	22
Tabel 3.1 Skedul Proses Penelitian	30
Tabel 3.2 Populasi Dan Sampel	32
Tabel 3.3 Defenisi Operasional.....	33
Tabel 4.1 Statistik Deskriptif	44
Tabel 4.2 Uji Normalitas.....	46
Tabel 4.3 Uji Auto Korelasi	48
Tabel 4.4 Uji Multikolinieritas.....	49
Tabel 4.5 Uji Regresi Linear Berganda.....	50
Tabel 4.6 Uji F	51
Tabel 4.7 Uji T	52
Tabel 4.8 Uji R <i>Square</i>	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Kerangka Konseptual	28
---------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Implementasi otonomi daerah ditandai dengan desentralisasi fiskal yang menunjukkan adanya pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya sendiri secara otonom. Pembangunan daerah hakekatnya merupakan upaya terencana untuk menghasilkan kapasitas pemerintah yang memiliki kemampuan handal dan profesional. Pembangunan nasional bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat, pembangunan yang dilakukan di daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota harus dilaksanakan secara terpadu, efektif dan efisien agar tercapai kemandirian daerah dan kemajuan yang merata diseluruh daerah. Kemandirian keuangan menjadi sangat penting bagi daerah terutama terkait dengan kontribusi keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Pemerintah provinsi menyusun APBD sebagai bentuk perencanaan daerah. Di dalam APBD memuat secara rinci program-program yang akan dilaksanakan sekaligus sumber pembiayaannya. Penyusunan anggaran ditata agar mampu meningkatkan kinerja penyelenggaraan daerah yang berorientasi pada optimisasi pelayanan publik, (BPS, 2016).

Tingkat kemampuan keuangan daerah dapat ditinjau salah satunya dari besar kecilnya penerimaan daerah khususnya pendapatan asli daerah dan retribusi. Realita yang terjadi di Provinsi Kalimantan dan Sulawesi, pemerintah daerah masih sangat bergantung pada bantuan pemerintah pusat meskipun memiliki PAD yang cukup besar. (Aditya, 2018)

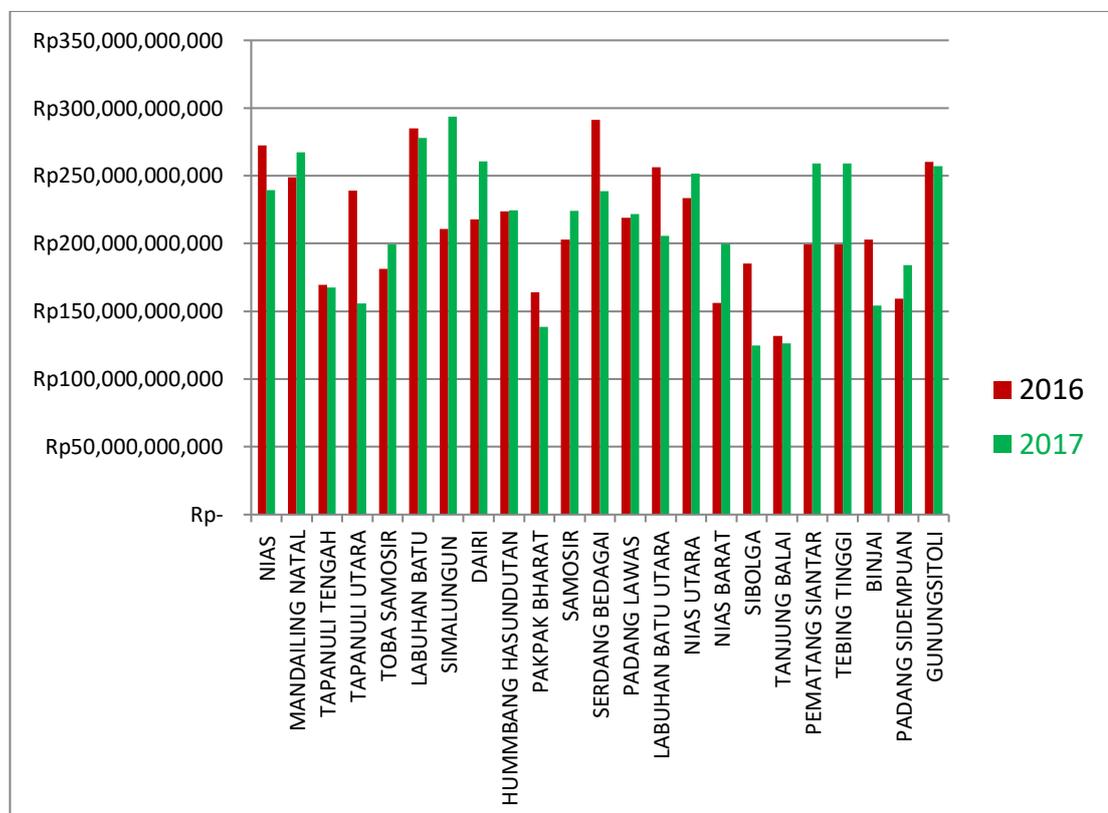
Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran daerah masing- masing dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (PP No.55/2005), (Erdi & Oktviani, 2015). Dengan desentralisasi, pemerintah daerah mampu mengoptimalkan kemampuan dalam mengelola sumber daya yang dimiliki sehingga tidak mengandalkan Dana Alokasi Umum. (Aditya, 2018)

Pertumbuhan ekonomi hingga kini masih digunakan sebagai indikator kemajuan perekonomian secara agregat. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan peningkatan dalam produksi barang maupun jasa dalam suatu perekonomian, sehingga pertumbuhan ekonomi ini merupakan salah satu indikator penting di dalam melakukan suatu analisis pembangunan ekonomi. Didalam usaha mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dibutuhkan modal untuk digunakan pada kegiatan yang menyentuh langsung aspek kehidupan masyarakat sebagai usaha pemerintah menggerakkan sektor perekonomian (Aditya, 2018)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu sumber penerimaan daerah yang bersangkutan harus ditingkatkan seoptimal mungkin dalam rangka mewujudkan semangat kemandirian lokal. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) merupakan suatu rencana operasional keuangan daerah, disatu pihak menggambarkan penerimaan pendapatan daerah dan dilain pihak merupakan pengeluaran untuk membiayai pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan dalam satu tahun anggaran. Pengeluaran untuk membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek pembangunan daerah. Berkaitan dengan pengeluaran pembangunan, yang sangat penting diperhatikan adalah penentuan komposisinya atau fungsi alokasi dari anggaran. Penggunaan anggaran pembangunan dapat

bermacam-macam, yaitu untuk membangun infrastruktur jalan, gedung kantor, pembelian mobil dinas dan lain sebagainya. (Oktafia, 2018)

Belanja modal adalah merupakan angka yang memberi gambaran tentang upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan pembangunan daerahnya. Pengeluaran Anggaran dari Belanja modal untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang dapat memberikan manfaat lebih dari satu tahun anggaran (PP No.71 Tahun 2010). Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran Belanja modal untuk menambah aset tetap. (Vanesha, 2019). Berikut data Belanja Modal Kota/Kabupaten pada tahun 2016-2017 terdapat pada tabel berikut ini:



Belanja modal merupakan pengeluaran yang dilakukan untuk membangun aset tetap. Aset tetap berupa fasilitas yang disediakan untuk pelayanan publik yang memadai sehingga dapat meningkatkan produktifitas perekonomian seperti

belanja tanah, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan dan aset lainnya. Berdasarkan tabel 1.1 (dilampiran 1) bahwa Belanja Modal di Pemerintah Kabupaten Nias Barat pada tahun 2016 sebesar 156.186.258 milyar rupiah dan tahun 2017 sebesar 199.747.993 milyar rupiah. Walaupun setiap tahun angka Belanja Modal meningkat namun aset tetap masih berkurang misalnya pembangunan jalan belum memadai.

Kemudian terjadi peningkatan PDRB per Kota/Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2016-2017. Salah satunya Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat memiliki PDRB yang paling rendah dari 33 Kota/Kabupaten yang ada di Sumatera Utara. Pada tahun 2016 PDRB kabupaten Pakpak Bharat sebesar 717,89 milyar rupiah sedangkan tahun 2017 total PDRB Pakpak Bharat naik menjadi 760,55 milyar rupiah. Walaupun setiap tahun meningkat namun tetap total PDRB Pakpak Bharat adalah paling rendah se-Sumatera Utara.

Besarnya Pendapatan Asli Daerah menjadi salah satu faktor penentu dalam menentukan belanja modal. Hal ini sesuai dengan PP No 58 tahun 2005 yang menyatakan bahwa APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan (Aditya, 2018). Seiring dengan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan dalam menghasilkan pendapatan asli daerah berdasarkan tabel 1.1 terlihat peningkatan dan penurunan pendapatan, salah satunya Kota/Kabupaten Nias Utara pada tahun 2016 sebesar 238.526,36 milyar rupiah sedangkan tahun 2017 sebesar 201.072,47 milyar rupiah mengalami penurunan.

Dana alokasi umum masing-masing daerah ditentukan berdasarkan potensi daerah, kebutuhan pembiayaan untuk mendukung penyelenggaraan/anggaran

pemerintah daerah. Dana alokasi umum bersumber dari pemerintah pusat yang bertujuan untuk kemampuan keuangan daerah untuk mendanai anggaran untuk meningkatkan kebutuhan dan mensejahterahkan daerah.

Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang. Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat Kabupaten Samosir pada tahun 2016 Dana Alokasi Khusus 0 sedangkan 2017 sebesar 207.841.807 milyar rupiah.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus, Terhadap Belanja Modal Di Pemerintahan Kota Kabupaten Di Sumatera Utara”**

1.2. Identifikasi Masalah

- a. Belanja modal yang kecil menyebabkan infrastruktur di daerah tersebut masih sedikit di pemerintahan Nias, Mandailing Natal, Tapanuli Tengah, Toba samosir, Labuhan Batu, Simalungun, Dairi, Nias Selatan, Humbang Hasundutan, Pakpak Bharat, Samosir, Serdang Bedagai, Padang Lawas, Labuhan Batu Utara, Nias Utara, Nias Barat, Sibolga, Tanjung Balai, Pematang Siantar, Tebing Tinggi, Binjai, Padang Sidempuan dan Gunungitoli.

- b. Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus semakin rendah sehingga belanja modal tidak dapat bertambah di Pemerintahan Nias, Mandailing Natal, Tapanuli Tengah, Toba samosir, Labuhan Batu, Simalungun, Dairi, Nias Selatan, Humbang Hasundutan, Pakpak Bharat, Samosir, Serdang Bedagai, Padang Lawas, Labuhan Batu Utara, Nias Utara, Nias Barat, Sibolga, Tanjung Balai, Pematang Siantar, Tebing Tinggi, Binjai, Padang Sidempuan dan Gunungitoli.

1.3. Batasan dan Perumusan Masalah

1.3.1. Pembatasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi (PDRB dalam harga konstan), Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal pada pemerintah Kota/Kabupaten di Sumatera Utara.

1.3.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang di kemukakan, maka permasalahan penelitian dapat di rumuskan sebagai berikut:

- a. Apakah PDRB harga konstan, Pendapatan Asli Daerah Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, berpengaruh secara parsial terhadap belanja modal di Pemerintahan Kota/ Kabupaten di Sumatera Utara
- b. Apakah PDRB harga konstan, Pendapatan Asli Daerah Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, berpengaruh secara simultan terhadap belanja modal di Pemerintahan Kota/ Kabupaten di Sumatera Utara.

1.4. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui PDRB, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus berpengaruh secara parsial terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kota/Kabupaten di Sumatera Utara.
- b. Untuk mengetahui PDRB, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus berpengaruh secara simultan terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kota/Kabupaten di Sumatera Utara.

1.4.2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini antara lain:

- a. Dari segi akademis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi media untuk mengaplikasikan berbagai teori yang di pelajari, sehingga akan berguna dalam pengembangan pemahaman, penalaran, pengalaman penulis, juga berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan sehingga dapat di kembangkan lebih lanjut dalam penelitian-penelitian selanjutnya.
- b. Dari segi praktis hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan masukan pada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengambil keputusan dalam belanja modal sebagai bahan kajian bagi pihak yang terkait dengan kebijakan ini sehingga dapat mengoptimalkan keberhasilan kebijakan.
- c. Memberikan rekomendasi bagi pemerintah Kota /Kabupaten Di Sumatera Utara untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat

- d. Untuk mengetahui bagaimana Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus, terhadap Belanja Modal.

1.5. Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian replikasi dari penelitian Venny Tria Vanesha (2019), yang berjudul :”Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus, Terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi”

Sedangkan penelitian ini berjudul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus, Terhadap Belanja Modal di Pemerintahan Kota/Kabupaten di Sumatera Utara”

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya yang terletak pada:

1. **Variabel penelitian** : penelitian terdahulu menggunakan 3 (tiga) variabel bebas (pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus) dan 1 (satu) variabel terikat (belanja modal). Penelitian ini menggunakan 4 (empat) variabel bebas yaitu pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus dan 1 (satu) variabel terikat yaitu belanja modal.
2. **Jumlah observasi/sampel (n)** : penelitian terdahulu berjumlah 11 Kota/Kabupaten sedangkan penelitian ini berjumlah 23 Kota/ Kabupaten.
3. **Waktu penelitian** : penelitian terdahulu dilakukan tahun 2019 sedangkan penelitian ini tahun 2020.

4. **Lokasi penelitian** : lokasi penelitian terdahulu di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi sedangkan penelitian ini dilakukan di Pemerintah Kota/Kabupaten di Sumatera Utara.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Uraian Teoritis

2.1.1. Belanja Daerah

Pengertian Belanja menurut PSAP No.2, (dalam Erlina, 2008) adalah “Semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi saldo Anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah”. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang, “Belanja Daerah didefinisikan sebagai kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih”. Istilah belanja terdapat dalam laporan realisasi anggaran, karena dalam penyusunan laporan realisasi anggaran masih menggunakan basis kas. Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi dan fungsi. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokkan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktifitas. Klasifikasi belanja menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah untuk tujuan pelaporan keuangan menjadi:

1. Belanja Operasi.

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat / daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi meliputi:

- a. Belanja Pegawai
- b. Belanja Barang

- c. Subsidi
- d. Hibah
- e. Bantuan Sosial.

2.1.2. Belanja Modal

Belanja Modal adalah pengeluaran pemerintah yang manfaatnya dapat digunakan dan dirasakan lebih dari satu tahun anggaran dan akan menambah aset dan kekayaan yang berakibat efektifitas perekonomian disuatu daerah. Belanja modal dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok, kelompok pertama adalah belanja publik yaitu belanja yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat umum, misalnya pembangunan jalan, jembatan, dll. Kelompok yang kedua adalah belanja aparatur yaitu belanja yang manfaatnya tidak langsung dirasakan langsung oleh masyarakat tetapi dirasakan langsung oleh aparatur, misalnya pembangunan gedung dewan dan lain-lain. Hampir semua anggaran belanja modal dikeluarkan berdasarkan komitmen adanya pengeluaran dalam dan untuk jangka panjang.

Pada pasal 53 ayat 4 Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 disebutkan bahwa Kepala Daerah menetapkan batas minimal kapitalisasi sebagai dasar pembebanan belanja modal selain memenuhi batas minimal juga pengeluaran anggaran untuk belanja barang tersebut harus memberi manfaat lebih satu periode akuntansi bersifat tidak rutin. Belanja modal merupakan angka yang memberi gambaran tentang upaya pemerintah pusat maupun daerah dalam meningkatkan pembangunan daerahnya. Sedangkan Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 huruf c Permendagri No 59 Tahun 2007 tentang perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pengelolaan Keuangan Daerah

digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Selanjutnya pada pasal 53 ayat 2 Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 ditentukan bahwa nilai aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/ pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan. Pemerintah menyusun Anggaran dari Belanja modal untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya sebagai berikut:

- a. Tanah,
- b. Jalan,
- c. Rumah sakit umum daerah,
- d. Irigasi, dan jaringan,
- e. Gedung dan bangunan,
- f. Peralatan dan mesin,
- g. Aset tetap lainnya,

2.1.3. Pertumbuhan Ekonomi

Kebijakan pemberian otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah merupakan langkah strategis bangsa Indonesia untuk menyongsong era globalisasi ekonomi dengan memperkuat perekonomian daerah. Pertumbuhan ekonomi mendorong Pemerintah Daerah untuk melakukan pembangunan ekonomi dengan mengelola sumber daya yang ada dan berbentuk pola kemitraan dengan masyarakat untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru yang akan mempengaruhi perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut. Pertumbuhan ekonomi merupakan angka yang menunjukkan kenaikan

kegiatan perekonomian suatu daerah setiap tahunnya. Pertumbuhan Ekonomi dapat diciptakan apabila didukung oleh infrastruktur atau sarana prasarana daerah yang baik, infrastruktur atau sarana prasarana tersebut menunjang potensi lokalnya seperti masyarakat untuk semakin berkembang sehingga tercipta pertumbuhan ekonomi pada daerah tersebut. Pemerintah Indonesia mempunyai target pertumbuhan ekonomi sebesar 7 % yang harus dicapai selama 2014-2019 yang tercantum pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan kenaikan output per kapita. Dalam hal ini, terdapat dua sisi yang perlu diperhatikan, yaitu sisi output total (*GDP/Gross Domestic Product*) dan sisi jumlah penduduk. Output perkapita adalah output total di bagi jumlah penduduk. Jadi proses kenaikan output perkapita, tidak dapat harus dianalisis dengan jalan melihat apa yang terjadi dengan output total di satu pihak, dan jumlah penduduk di lain pihak. Suatu teori pertumbuhan ekonomi yang lengkap haruslah dapat menjelaskan apa yang terjadi dengan GDP total dan apa yang terjadi dengan jumlah penduduk. Karena dengan hanya mengkaitkan kedua aspek tersebut maka perkembangan output per kapita dapat dijelaskan juga. Aspek yang ketiga dari definisi pertumbuhan ekonomi adalah perspektif waktu jangka panjang. Kenaikan output per kapita selama satu atau dua tahun, yang kemudian diikuti dengan penurunan output per kapita bukan merupakan pertumbuhan ekonomi. Suatu perekonomian dikatakan tumbuh apabila kenaikan output per kapita berada dalam jangka waktu yang cukup lama (10, 20, atau 50 tahun, bahkan lebih lama lagi). Tentu saja dapat terjadi bahwa pada suatu tahun tertentu, output per kapita merosot (misalnya, gagal panen). Tetapi, apabila selama jangka waktu yang cukup panjang tersebut output per kapita menunjukkan

kecenderungan yang jelas mengalami kenaikan maka dapat dikatakan telah terjadi pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah Daerah mempunyai andil untuk membantu pemerintah pusat mencapai target pertumbuhan ekonomi dikarenakan ekonomi nasional dan ekonomi daerah berhubungan secara timbal balik. Hal tersebut yang mendasari pemerintah pusat memberikan instruksi yang juga tercantum dalam RPJMN yaitu pemerintah kabupaten/kota diharuskan mengalokasikan belanja modal minimal sebesar 30 % dari total belanja daerah. Instruksi tersebut yang menyebabkan alokasi belanja modal akan meningkat dikarenakan pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab kepada pemerintah pusat untuk membantu mencapai target pertumbuhan ekonomi dengan cara pengalokasian belanja yang produktif yaitu belanja modal. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Purwanto (2013), Sudrajat dan Purniawati (2017), Ayem dan Pratama (2018) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap belanja modal.. Persyaratan ini mungkin terlalu ketat. Tetapi apabila dipenuhi maka kita dapat yakin bahwa kenaikan output per kapita tersebut akan merupakan proses jangka panjang. Pertumbuhan dalam masyarakat sering kali dititik beratkan pada proses peningkatan produksi dan jasa dalam kegiatan ekonomi. Paham pertumbuhan digunakan dalam teori dinamika sebagaimana hal itu dikembangkan oleh para pemikir *Neo-Keynes* dan *Neo-Klasik*. Pembangunan ekonomi mengandung arti yang lebih luas dan mencakup perubahan pada tata susunan ekonomi masyarakat secara menyeluruh. (Nindia, 2018)

Pembangunan merupakan proses transformasi yang dalam perjalanan waktu ditandai oleh perubahan struktural ekonomi dalam masyarakat, yaitu

perubahan pada landasan kegiatan ekonomi maupun pada kerangka susunan ekonomi masyarakat yang bersangkutan. Dalam paradigma sosial, pertumbuhan dimaksudkan sebagai pencapaian cara hidup dan pola berpikir manusia dari tingkat sederhana hingga ke tingkat yang lebih kompleks.

2.1.4. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pembiayaan untuk anggaran belanja modal. PAD didapatkan dari iuran langsung dari masyarakat, seperti pajak, restribusi, dan lain sebagainya. Tanggung jawab agen (pemerintah daerah) kepada prinsipal (masyarakat) adalah memberikan pelayanan publik (*public service*) yang baik kepada masyarakat melalui anggaran belanja modal, karena masyarakat telah memberikan sebagian uangnya kepada pemerintah daerah. Bentuk pelayanan publik yang diberikan pemerintah kepada masyarakat dengan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai di daerahnya. Pengadaan infrastruktur atau sarana prasana tersebut dibiayai dari alokasi anggaran belanja modal dalam APBD tiap tahunnya. Dengan demikian, ada hubungan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan pengalokasian belanja modal. Tetapi tidak semua daerah yang berpendapatan tinggi diikuti dengan pertumbuhan ekonomi yang baik pula (Ahmad, 2009).

a. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu:

1. Pajak Daerah

- a) Pajak Provinsi,
- b) Pajak Kabupaten/ Kota

2. Retribusi Daerah, terdiri dari:
 - a) Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perijinan Tertentu.
3. Hasil Perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah, yaitu: Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, tuntutan ganti rugi, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/ atau pengadaan barang dan atau jasa oleh daerah.

2.1.5. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum adalah merupakan transfer yang bersifat umum (block grant) yang diberikan kepada semua kabupaten dan kota untuk tujuan mengisi kesenjangan antara kapasitas dan kebutuhan fiskalnya dan didistribusikan dengan formula berdasarkan prinsip-prinsip tertentu yang secara umum mengindikasikan bahwa daerah miskin dan terbelakang harus menerima lebih banyak dari pada daerah kaya (Fadillah, 2017). Dengan adanya transfer DAU dari pemerintahan pusat, maka daerah bisa lebih fokus untuk menggunakan DAU yang dimilikinya untuk membiayai Belanja Modal yang menunjang tujuan pemerintahan yaitu meningkatkan pelayanan publik. Transfer DAU dari pemerintah pusat dapat menunjang pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan publik melalui pembangunan infrastruktur serta sarana melalui alokasi anggaran Belanja Modal,

dengan meningkatnya pelayanan publik diharapkan pula menunjang peningkatan pendapatan masyarakat. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Yawa dan Runtu (2015), Mubasiroh (2018), Sulistyorini (2018) menunjukkan bahwa dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja modal

Menurut UU No. 25 Tahun 1999, alokasi DAU ke suatu daerah ditetapkan berdasarkan dua faktor, yaitu potensi perekonomian dan kebutuhan daerah. Kebutuhan daerah (*fiscal need*) dicerminkan oleh jumlah penduduk, luas wilayah, keadaan geografis, dan tingkat pendapatan masyarakat. Potensi perekonomian antara lain dicerminkan oleh potensi penerimaan pemerintah daerah (*fiscal capacity*), seperti dari hasil industri dan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan PDRB.

Potensi perekonomian antara lain dicerminkan oleh potensi penerimaan pemerintah daerah (*fiscal capacity*), seperti dari hasil industri dan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan PDRB. Berdasarkan Undang-Undang tersebut Dana Alokasi Umum ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari penerimaan dalam negeri yang kemudian disalurkan kepada provinsi sebesar 10% dan kabupaten atau kota sebesar 90% dari total DAU. Dana Alokasi Umum merupakan dana yang bersifat “*Block Grant*” yang artinya ketika dana tersebut diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah bebas untuk menggunakan dan mengalokasikan dana ini sesuai prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

DAU akan memberikan kepastian bagi daerah dalam memperoleh sumber pembiayaan untuk membiayai kebutuhan pengeluaran yang menjadi tanggung

jawab masing-masing daerah. DAU diberikan berdasarkan celah fiskal dan alokasi dasar. Celah fiskal merupakan kebutuhan daerah yang dikurangi dengan kapasitas fiskal daerah, kebutuhan daerah dihitung berdasarkan variabel-variabel yang ditetapkan undang-undang sedangkan perhitungan kapasitas fiskal didasarkan atas Dana Alokasi Umum (DAU) diterima daerah. Sementara Alokasi Dasar dihitung berdasarkan gaji PNS daerah.

Setiap daerah yang memiliki kapasitas fiskal yang lebih besar dari kebutuhan fiskal maka dapat menerima penurunan DAU, dan atau tidak menerima sama sekali pada tahun berikutnya. Dana Alokasi Umum (DAU) masih tetap menjadi salah satu bagian terbesar anggaran nasional dan juga merupakan sumber utama anggaran pemerintah daerah. Oktriniatmaja (2011) melakukan penelitian pada Kabupaten/Kota di Pulau Jawa dan Bali menemukan bahwa terdapat pengaruh positif DAU terhadap belanja modal. DAU yang diberikan oleh pemerintah pusat bersifat *block grant*, artinya peruntukan DAU merupakan kewenangan penuh dari pemerintah daerah. Fleksibilitas penggunaan DAU ini menjadi salah satu alternatif sumber pembiayaan untuk belanja modal. DAU yang semakin meningkat akan memberi peluang yang lebih besar guna peningkatan alokasi belanja modal (Yasser, 2015).

Setiap transfer dana alokasi umum yang diterima daerah akan ditunjukkan untuk belanja pemerintah daerah termasuk untuk belanja modal, maka tidak jarang apabila pemerintah daerah menetapkan rencana pendapatan secara pesimis dan rencana belanja cenderung optimis supaya transfer dana alokasi umum yang diterima daerah lebih besar. Transfer dana alokasi umum dari Pemerintah Pusat maka daerah bisa lebih focus untuk menggunakan pendapatan asli daerah yang

dimiliki untuk membiayai belanja modal yang menunjang tujuan pemerintah yaitu meningkatkan pelayanan publik.

Dana Alokasi Umum (DAU) masih tetap menjadi salah satu bagian terbesar anggaran nasional dan juga merupakan sumber utama anggaran pemerintah daerah. Oktriniatmaja (2011) melakukan penelitian pada Kabupaten/Kota di Pulau Jawa dan Bali menemukan bahwa terdapat pengaruh positif DAU terhadap belanja modal. DAU yang diberikan oleh pemerintah pusat bersifat *block grant*, artinya peruntukan DAU merupakan kewenangan penuh dari pemerintah daerah. Fleksibilitas penggunaan DAU ini menjadi salah satu alternatif sumber pembiayaan untuk belanja modal. DAU yang semakin meningkat akan memberi peluang yang lebih besar guna peningkatan alokasi belanja modal (Yasser, 2015).

2.1.6. Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus merupakan dana perimbangan yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk membiayai khusus yang merupakan urusan daerah dan prioritas pembangunan nasional. Tujuannya untuk mengurangi beban biaya kegiatan khusus yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah (Ardhini, 2011). Pemanfaatan DAK diarahkan kepada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan publik dengan umur ekonomis panjang. Dengan diarahkannya pemanfaatan DAK untuk kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik dengan cara meningkatkan belanja modal. Selain itu, ada yang berpendapat bahwa DAK merupakan salah satu sumber pendanaan untuk sebuah Belanja Modal (Pohan, 2018). Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat hubungan antara pemberian dana transfer dari pemerintah pusat (DAK) dengan alokasi anggaran pengeluaran

daerah melalui Belanja Modal. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Karyadi (2017), Fadillah (2017), Gerungan dkk (2017) menunjukkan bahwa dana alokasi khusus berpengaruh terhadap belanja modal.

DAK merupakan dana yang dialokasikan dari APBN ke Daerah tertentu untuk mendanai kebutuhan khusus yang merupakan urusan daerah dan juga prioritas nasional antara lain: kebutuhan kawasan transmigrasi, kebutuhan beberapa jenis investasi atau prasarana, pembangunan jalan di kawasan terpencil, saluran irigasi primer, dan lain-lain. Menurut peraturan perundang-undangan yang baru untuk daerah otonom, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004, wilayah yang menerima DAK harus menyediakan dana pendamping paling tidak 10% dari DAK yang ditransfer ke wilayah, dan dana pendamping ini harus dianggarkan dalam anggaran daerah (APBD).

Meskipun demikian, wilayah dengan pengeluaran lebih besar dari penerimaan tidak perlu menyediakan dana pendamping. Tetapi perlu diketahui bahwa tidak semua daerah menerima DAK karena DAK bertujuan untuk pemerataan dan untuk meningkatkan kondisi infrastruktur fisik yang merupakan prioritas nasional.

Menurut Departemen Keuangan kebijakan DAK bertujuan untuk :

- a. Menunjang percepatan pembangunan sarana dan prasarana di daerah pesisir dan pulau-pulau kecil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah tertinggal/terpencil, daerah rawan banjir/longsor, serta termasuk kategori daerah ketahanan pangan dan daerah pariwisata.
- b. Diprioritaskan untuk membantu daerah-daerah dengan kemampuan keuangan di bawah rata-rata nasional, dalam rangka mendanai kegiatan

penyediaan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat yang telah merupakan urusan daerah.

- c. Meningkatkan akses penduduk miskin terhadap pelayanan dasar dan prasarana dasar melalui kegiatan khusus di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
- d. Mendorong peningkatan produktivitas perluasan kesempatan kerja dan diversifikasi ekonomi terutama di pedesaan, melalui kegiatan khusus di bidang pertanian, kelautan dan perikanan, serta infrastruktur.
- e. Menjaga dan meningkatkan kualitas hidup, serta mencegah kerusakan lingkungan hidup, dan mengurangi risiko bencana melalui kegiatan khusus dalam bidang lingkungan hidup, mempercepat penyediaan serta meningkatkan cakupan dan kehandalan pelayanan prasarana dan sarana dasar dalam satu kesatuan sistem yang terpadu melalui kegiatan khusus di bidang infrastruktur.
- f. Mendukung penyediaan prasarana di daerah yang terkena dampak pemekaran pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi melalui kegiatan khusus dalam bidang prasarana pemerintahan.
- g. Mengalihkan secara bertahap dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang digunakan untuk mendanai kegiatan-kegiatan yang telah menjadi urusan daerah ke DAK. Dana yang dialihkan berasal dari anggaran Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Kesehatan.

- h. Meningkatkan keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang didanai dari DAK dengan kegiatan yang didanai dari anggaran Kementerian/Lembaga dan kegiatan yang didanai dari APBD.

2.2. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1. Adapun penelitian yang digunakan sebagai referensi pengambilan penelitian ini adalah sebagai berikut:

No.	Peneliti	Judul	Variabel X	Variabel Y	Model analisis	Hasil Penelitian
1	Venny Tria Vanesha (2019)	Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap belanja modal pada kabupaten/kota di Provinsi Jambi	Pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus	Belanja Modal	Regresi linear berganda	Berdasarkan hasil penelitian Dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal kabupaten/kota di Provinsi Jambi. Oleh karena itu pemerintah kabupaten/kota hendaknya lebih memaksimalkan Dana alokasi umum untuk dialokasikan ke belanja modal, seperti membiayai kegiatan-kegiatan yang berbasis pada peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur.
2	Eva Sulistyorini (2018)	Pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli Daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja modal Pada kota/kabupaten di provinsi jawa timur	Pertumbuhan ekonomi (X1), pendapatan asli Daerah (X2), dana alokasi umum (X3)	Terhadap Belanja Modal (Y1)	Regresi linear berganda	Berdasarkan hasil penelitian Belanja modal merupakan pengeluaran yang dilakukan untuk membangun aset tetap, aset tetap berupa fasilitas yang disediakan untuk pelayanan publik yang memadai sehingga dapat meningkatkan produktifitas perekonomian. Kota/Kabupaten Di Provinsi Jawa Timur
3	Sheila	Pengaruh	Pendapatan	Pengalok	Regresi	Hasil penelitian

	Ardhian Nuarisa (2012)	PAD, DAU dan DAK Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal	Asli Daerah (X1), Dana Alokasi Umum (X2),	asian anggaran belanja modal	linear berganda	menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. Bagi Pemerintah daerah diharapkan meningkatkan komponen-komponen PAD agar PAD dapat meningkat sehingga alokasi untuk belanja modal dapat ditambah.
4	Dina Mei Eka Aditya (2018)	Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi Umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil terhadap belanja Modal (studi pada Provinsi/Wilayah Kalimantan dan Sulawesi)	Pendapatan asli daerah (X1), dana alokasi Umum (X2), dana alokasi khusus (X3) dana bagi hasil (X4)	Belanja Modal (Y1)	Regresi linear berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan lokal berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap Belanja Modal. Dana Alokasi Khusus memiliki efek positif yang signifikan terhadap Belanja Modal. Dana Bagi Hasil memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap Belanja Modal.
5	Mohamad Sarif (2017)	Pengaruh dana alokasi umum, dana alokasi Khusus, pendapatan asli daerah dan dana Bagi hasil terhadap belanja modal (survei pada kabupaten/kota di Sulawesi Tengah)	Dana alokasi umum (X1), dana alokasi Khusus (X2), pendapatan asli daerah (X3), dan dana Bagi hasil (X4)	Belanja Modal (Y)	Regresi linear berganda	Hasil penelitian ini bahwa dana bagi hasil merupakan sumber pendapatan namun masih sebagian kecil digunakan untuk membiayai belanja modal. Pendapatan yang dimiliki daerah wajib dialokasikan secara tepat dan terarah dalam membiayai belanja-belanja pada pemerintah kabupaten dan kota di Sulawesi Tengah.

2.3. Kerangka Konseptual

Pemberian otonomi yang lebih besar akan memberikan dampak yang lebih besar bagi pertumbuhan ekonomi jika pemanfaatan belanja modal di alokasikan untuk hal-hal produktif misalnya untuk aktifitas pembangunan.

Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang di produksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan mendapatkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi bersangkutan paut dengan proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Dapat dikatakan bahwa pertumbuhan menyangkut perkembangan yang berdimensi tunggal dan di ukur dengan meningkatnya hasil produksi dan pendapatan. (Rudiansyah, 2014)

Tingkat pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tujuan penting pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, dengan mendorong untuk melakukan pembangunan ekonomi dengan mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan dengan masyarakat untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru yang akan mempengaruhi kegiatan ekonomi daerah. Faktor penting penentu pertumbuhan ekonomi salah satunya adalah pengeluaran pemerintah. Pertumbuhan ekonomi merupakan parameter dari suatu kegiatan pembangunan. Yang terjadi pada pemerintah daerah pada saat ini adalah peningkatan pertumbuhan ekonomi tidak selalu diikuti dengan meningkatnya belanja modal, hal ini dapat dilihat dari jumlah besar kecilnya belanja modal yang dianggarkan dengan anggaran belanja daerah.

Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal, hal ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah meningkat, maka kemampuan daerah untuk melakukan pengeluaran Belanja Modal juga akan mengalami peningkatan. PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tujuan dari PAD adalah untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu sumber penerimaan daerah yang bersangkutan harus ditingkatkan seoptimal mungkin dalam rangka mewujudkan semangat kemandirian lokal.

Pemerintah daerah menyusun anggaran penerimaan dan pengeluaran yang telah ditetapkan kepala daerah, dimana anggaran penerimaan diperoleh dari pendapatan asli daerah misalnya pajak, retribusi dan iklan. Besarnya pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah mampu merealisasikan anggaran pengeluaran. Namun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) merupakan suatu rencana operasional keuangan daerah, disatu pihak menggambarkan penerimaan pendapatan daerah dan dilain pihak merupakan pengeluaran untuk membiayai pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan dalam satu tahun anggaran. Pengeluaran untuk membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek pembangunan daerah. Berkaitan dengan pengeluaran pembangunan, yang sangat penting diperhatikan adalah penentuan komposisi nya atau fungsi alokasi dari anggaran.

Dana Alokasi Umum terhadap belanja modal sangat berpengaruh karena Dana Alokasi Umum yang diperoleh dari pemerintah daerah akan dialokasikan untuk pembiayaan aset tetap, salah satunya dalam bentuk belanja jalan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik. Oleh karena itu, jika Dana Alokasi Umum yang diperoleh pemerintah daerah semakin tinggi maka belanja modal di daerah tersebut akan meningkat pula.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, menjelaskan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Distribusi DAU kepada daerah-daerah yang memiliki kemampuan relatif besar akan lebih kecil dan sebaliknya daerah-daerah yang mempunyai kemampuan keuangan relatif kecil akan memperoleh DAU yang relatif besar. DAU untuk suatu daerah kabupaten/kota tertentu ditetapkan berdasarkan perkalian jumlah DAU untuk seluruh daerah kabupaten/kota yang ditetapkan dalam APBN dengan porsi daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.

Dalam pengaturan keuangan menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 Dana Alokasi Umum (DAU) adalah provinsi berupa transfer antar pemerintah dari pusat ke kabupaten dan kota yang disebut dengan Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Dana Alokasi Umum adalah merupakan transfer yang bersifat umum (*block grant*) yang diberikan kepada semua kabupaten dan kota untuk tujuan mengisi kesenjangan antara kapasitas dan kebutuhan fiskalnya dan didistribusikan dengan formula berdasarkan prinsip-prinsip tertentu yang secara

umum mengindikasikan bahwa daerah miskin dan terbelakang harus menerima lebih banyak dari pada daerah kaya. “Dengan kata lain tujuan alokasi Dana Alokasi Umum adalah dalam rangka pemerataan kemampuan penyediaan pelayanan publik antar pemda di Indonesia” (Kuncoro, 2014)

Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap belanja modal, karena Dana Alokasi Khusus adalah merupakan dana yang berasal dari APBN dan dialokasikan ke daerah Kabupaten/Kota untuk membiayai kebutuhan tertentu yang sifatnya khusus, tergantung tersedianya dana dalam APBN yang diprioritaskan untuk membantu daerah-daerah dengan kemampuan keuangan di bawah rata-rata nasional, dalam rangka mendanai kegiatan penyediaan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat yang telah merupakan urusan daerah.

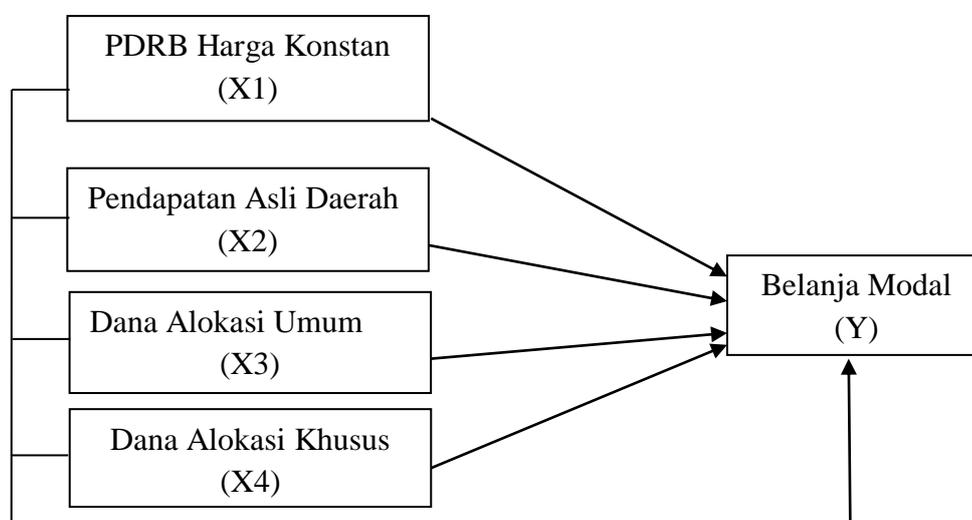
Tujuan dari DAK yaitu, untuk mengurangi beban biaya kegiatan khusus yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah. Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus diarahkan kepada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, perbaikan, sarana dan prasarana fisik pelayanan publik dengan umur ekonomis panjang. Dengan diarahkannya pemanfaatan Dana Alokasi Khusus untuk kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik yang direalisasikan dalam belanja modal, (Ardhani, 2011).

Dana Alokasi Khusus (DAK), merupakan dana yang berasal dari APBN dan dialokasikan ke daerah kabupaten/kota untuk membiayai kebutuhan tertentu yang sifatnya khusus, tergantung tersedianya dana dalam APBN. Kebutuhan khusus adalah kebutuhan yang sulit diperkirakan dengan rumus alokasi umum, dan atau kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional. Selain pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana

Alokasi Khusus (DAK) juga memiliki pengaruh terhadap anggaran Belanja Modal (BM), karena DAK ini juga cenderung akan menambah aset tetap yang dimiliki oleh pemerintah guna meningkatkan pelayanan publik.

Berdasarkan hasil penelitian Venny Tria Vanesha dengan judul Pengaruh pendapatan asli daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi menunjukkan hasil penelitian Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten/Kota hendaknya lebih memaksimalkan Dana Alokasi Umum untuk dialokasikan ke belanja modal, seperti membiayai kegiatan-kegiatan yang berbasis pada peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur.

Dalam penelitian ini menjelaskan tentang Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus, terhadap Belanja Modal di Pemerintahan Kota/kabupaten di Sumatera Utara. Untuk itu peneliti membuat kerangka konseptual sebagai berikut:



Gambar 2.1 Krangka Konseptual

2.4. Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan sementara atas suatu hubungan, sebab akibat dari keterkaitan variabel yang perlu dibuktikan kebenarannya. Hipotesis dapat dibedakan dalam hipotesis kuantitatif atau asosiatif yang berbentuk statistik.

Dari pengertian hipotesis tersebut, penulis membuat hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh positif dan signifikan PDRB, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus secara parsial terhadap Belanja Modal di Pemerintahan Kota/Kabupaten di Sumatera Utara.
2. Terdapat pengaruh positif dan signifikan PDRB, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus secara simultan terhadap Belanja Modal di Pemerintahan Kota/Kabupaten di Sumatera Utara.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan asosiatif/kualitatif. Menurut Rusiadi, dkk (2014) “pendekatan asosiatif/ kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui derajat hubungan dan pola/bentuk pengaruh antara dua variabel atau lebih”. Dimana dengan penelitian ini maka akan dibangun suatu teori yang berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu gejala.

3.2. Tempat Dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian ini dilakukan di Badan Pusat Statistik Sumatera Utara, beralamat Jl. Asrama no.179. Waktu penelitian ini direncanakan pada bulan Maret 2019 sampai dengan Maret 2020. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1 Skedul Proses Penelitian

No.	Jenis Kegiatan	Mrt, 2019	Apr s/d Nov, 2019	Des, 2019	Jan, 2020	Feb, 2020	Mrt, 2020	Apr, 2020	Mei, 2020
1	Riset awal/pengajuan judul	■							
2	Penyusunan proposal		■						
3	Seminar proposal			■					
4	Perbaiki/ acc proposal				■				
5	Pengolahan Data					■			
6	Penyusunan Skripsi						■		
7	Bimbingan Skripsi							■	

3.3. Populasi Dan Sampel

3.3.1. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan objek penelitian atau objek yang diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pemerintah Kota/Kabupaten di Sumatera Utara berdasarkan data yang didapatkan dari Badan Pusat Statistik Sumatera Utara sebanyak 33 Kota/Kabupaten.

3.3.2. Sampel

Sampel dalam penelitian ini adalah “sebagian/wakil dari populasi yang diteliti. Menurut Rusiadi, dkk (2014) sampel adalah sebagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *proposive sampling* dengan kriteria yaitu:

- a. Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara yang mempublikasikan laporan keuangannya secara konsisten dari tahun 2013-2017.
- b. Data PDRB dalam harga konstan, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus DAN Belanja Modal Di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2013-2017.
- c. Pemerintah Kota/Kabupaten yang belanja modal $< 300.000.000.000$ di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2013-2017.

Sehingga jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 23 pemerintah Kota/Kabupaten Di Sumatera Utara. Berikut ini tabel sampel penelitian sebagai berikut:

Tabel 3.2 Populasi Dan Sampel

No.	KABUPATEN	Kriteria			Sampel
		1	2	3	
1	Nias	√	√	√	Sampel 1
2	Mandailing Natal	√	√	√	Sampel 2
3	Tapanuli Selatan	X	X	x	-
4	Tapanuli Tengah	√	√	√	Sampel 3
5	Tapanuli Utara	X	X	x	-
6	Toba Samosir	√	√	√	Sampel 4
7	Labuhan Batu	√	√	√	Sampel 5
8	Asahan	X	X	x	-
9	Simalungun	√	√	√	Sampel 6
10	Dairi	√	√	√	Sampel 7
11	Karo	X	X	x	-
12	Deli Serdang	X	X	x	-
13	Langkat	X	X	x	-
14	Nias Selatan	√	√	√	Sampel 8
15	Humbang Hasundutan	√	√	√	Sampel 9
16	Pakpak Bharat	√	√	√	Sampel 10
17	Samosir	√	√	√	Sampel 11
18	Serdang Bedagai	√	√	√	Sampel 12
19	Batu Bara	X	X	x	-
20	Padang Lawas Utara	X	X	x	-
21	Padang Lawas	√	√	√	Sampel 13
22	Labuhan Batu Selatan	X	X	x	-
23	Labuhan Batu Utara	√	√	√	Sampel 14
24	Nias Utara	√	√	√	Sampel 15
25	Nias Barat	√	√	√	Sampel 16
	Kota				
26	Sibolga	√	√	√	Sampel 17
27	Tanjung Balai	√	√	√	Sampel 18
28	Pematang Siantar	√	√	√	Sampel 19
29	Tebing Tinggi	√	√	√	Sampel 20
30	Medan	X	X	x	-
31	Binjai	√	√	√	Sampel 21
32	Padang Sidempuan	√	√	√	Sampel 22
33	Gunungsitoli	√	√	√	Sampel 23

3.4. Variabel Penelitian Dan Defenisi Operasional

3.4.1. Variabel Penelitian

Variabel penelitian mencakup variabel apa yang akan di teliti. Dalam penelitian ini menggunakan 4 (empat) varaibael bebas yaitu: varibel bebas pertama Pertumbuhan Ekonomi (X_1), variabel bebas kedua Pendapatan Asli

Daerah (X_2), variabel ketiga Dana Alokasi Daerah (X_3), variabel keempat Dana Alokasi Khusus (X_4), dan variabel terikat yaitu belanja modal (Y).

3.4.2. Defenisi Operasional

Defenisi operasional merupakan petunjuk bagaimana suatu variabel diukur secara operasional dilapangan yaitu Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus, terhadap Belanja Modal di Pemerintahan Kota/Kabupaten di Sumatera Utara. Sehingga indikator dirangkum dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.3 Defenisi Operasional

Variabel	Indikator	Deskriptif	Skala
Pertumbuhan ekonomi (X_1)	PDRB Menurut Kabupaten/Kota	Jumlah keseluruhan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari semua kegiatan perekonomian diseluruh wilayah dalam periode tahun tertentu yang pada umumnya dalam waktu satu tahun. (Windari, 2017)	Nominal
PAD (X_2)	1. Retribusi daerah, 2. Pajak daerah, 3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, 4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.	Pendapatan Asli Daerah Adalah Penerimaan Yang Di Peroleh Daerah Dari Sumber-Sumber Didalam Daerahnya Sendiri Yang Dipungut Berdasarkan Peraturan Daerah Sesuai Perundang Undangan Yang Berlaku (Undang – Undang No.33 Tahun2004) (Tahar, 2011)	Nominal
DAU (X_3)	Dana alokasi umum pada laporan realisasi APBD.	Dana alokasi umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBD yang di alokasikan dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah, yntuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Nuarisa, 2013)	Nominal
DAK (X_4)	Dana alokasi khusus pada laporan realisasi APBD.	Dana lokasi khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang	Nominal

		dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. (Nuarisa, 2013)	
Belanja modal (Y)	<ul style="list-style-type: none"> a. Belanja tanah, b. Belanja gedung Dan bangunan, c. Belanja jalan dan aset lainnya. 	Belanja modal adalah merupakan angka yang memberi gambaran tentang upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan pembangunan daerahnya. Pengeluaran Anggaran dari Belanja modal untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang dapat memberikan manfaat lebih dari satu tahun anggaran (PP No.71 Tahun 2010). Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran Belanja modal untuk menambah aset tetap. (Vanesa, 2019)	Nominal

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi dokumentasi. Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian dalam rangka memperoleh informasi terkait objek penelitian (Sugyono, 2010).

Studi dokumentasi dilakukan untuk mendukung data skunder. Seperti data perusahaan/lembaga laporan keuangan dan lainnya. Data dokumen biasanya langsung berbentuk kuantitatif.

3.6. Teknik Analisa Data

3.6.1. Uji Regresi Linear Berganda

Dalam penelitian penulis menggunakan teknik analisa regresi linear berganda. Diman perhitungan data dengan menggunakan metode regresi linear berganda menggunakan persamaan:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \varepsilon$$

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ = Koefisien Regresi X_1, X_2, X_3, X_4

Y = Belanja Modal

α = Konstanta

X_1 = PDRB Harga Konstan

X_2 = Pendapatan Asli Daerah

X_3 = Dana Alokasi Umum

X_4 = Dana Alokasi Khusus

β = Koefisien Regresi

ε = Error

3.6.2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas data dilakukan sebelum data diolah berdasarkan model-model penelitian yang diajukan. Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Jika asumsi ini dilanggar maka model dianggap tidak valid dengan jumlah sampel yang ada.

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan uji F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistic menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan *Kolmogorov Smirnov*. Penelitian ini menggunakan taraf signifikan 5% dengan melihat signifikan (*asymsig. Pada output package for social science*). Dari nilai *Kolmogro-Smirnov* > 5% maka data digunakan distribusi normal.

b. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditekan adanya korelasi antara variabel bebas (independen). Uji ini dilakukan dengan melihat nilai *tolerance dan variance inflation faktor (VIP)* dari hasil analisis dengan menggunakan SPSS. Apabila nilai *tolerance* > 0,10 atau *VIP* < 10 maka disimpulkan tidak terjadinya multikolinieritas.

c. Uji Heterokedasitas

Uji heterokedasitas adalah untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varians dari residual dari suatu pengamatan yang lain. Deteksi heterokedasitas dapat dilakukan dengan metode scatterplot dengan memplotkan nilai ZPRED (nilai prediksi dengan SRESID (nilai residualnya)).

Dasar analisis untuk mencari gejala heterokedastisitas yaitu:

1. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang membentuk pola tertentu teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit maka telah terjadi heterokedasitas).
2. Jika tidak ada pola yang jelas, titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi gejala heterokedasitas.

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi adalah melihat apakah terjadi korelasi antara video dengan periode sebelumnya (t-1) secara sederhana bahwa analisis regresi adalah untuk melihat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat jadi tidak boleh ada korelasi antara observasi dengan data sebelumnya.

3.6.3. Uji Hipotesis

a. Uji t (persial)

Pengujian hipotesis secara persial yaitu pengujian secara individual, dapat di uji dengan menggunakan uji (T-Test) bertujuan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y).

b. Uji F

Uji F untuk mengetahui pengaruh stimulant antara variabel independen terhadap independen, kriteria pengujiannya adalah:

1. Terima H_0 (tolak H_1), apabila $F_{hitung} < F_{tabel}$ atau $\text{sig } F > \alpha\%$
2. Tolak H_0 (Terima H_1), apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau $\text{sig } F < \alpha\%$

3. Uji R² Koefisien determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (*R square* atau R Kuadrat) atau disimbolkan dengan R^2 yang bermakna sebagai sumbangan pengaruh yang diberikan variabel bebas atau variabel independen (X) terhadap variabel terikat atau variabel dependen (Y) atau dengan kata lain, nilai koefisien determinasi atau *R Square* ini berguna untuk memprediksi dan melihat seberapa kontribusi pengaruh yang diberikan variabel X secara simultan (bersama-sama) terhadap variabel Y.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Objek Penelitian

4.1.1. Sejarah Provinsi Kota/Kabupaten Provinsi Sumatera Utara

Provinsi Sumatera Utara terletak pada 1° - 4° Lintang Utara dan 98° - 100° Bujur Timur, Luas daratan Provinsi Sumatera Utara 72.981,23 km². Sumatera Utara pada dasarnya dapat dibagi atas Pesisir Timur, Pegunungan Bukit Barisan, Pesisir Barat dan Kepulauan Nias

Pesisir timur merupakan wilayah di dalam provinsi yang paling pesat perkembangannya karena persyaratan infrastruktur yang relatif lebih lengkap daripada wilayah lainnya. Wilayah pesisir timur juga merupakan wilayah yang relatif padat konsentrasi penduduknya dibandingkan wilayah lainnya. Pada masa kolonial Hindia Belanda, wilayah ini termasuk *residentie Sumatra's Oostkust* bersama provinsi Riau.

Pada zaman pemerintahan Belanda, Sumatera Utara merupakan suatu pemerintahan yang bernama *Gouvernement van Sumatera* dengan wilayah meliputi seluruh pulau Sumatera, dipimpin oleh seorang Gubernur yang berkedudukan di Kota Medan. Setelah kemerdekaan, dalam sidang pertama Komite Nasional Daerah (KND), Provinsi Sumatera kemudian dibagi menjadi tiga sub provinsi yaitu: Sumatera Utara, Sumatera Tengah, dan Sumatera Selatan. Provinsi Sumatera Utara sendiri merupakan penggabungan dari tiga daerah administratif yang disebut keresidenan yaitu: Keresidenan Aceh, Keresidenan Sumatera Timur, dan Keresidenan Tapanuli. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia (R.I.) No. 10 Tahun 1948 pada tanggal 15 April

1948, ditetapkan bahwa Sumatera dibagi menjadi tiga Provinsi yang masing-masing berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri yaitu: Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Tengah, dan Provinsi Sumatera Selatan. Tanggal 15 April 1948 selanjutnya ditetapkan sebagai hari jadi Provinsi Sumatera Utara.

Wilayah Sumatera Utara berada pada jalur perdagangan internasional, dekat dengan dua negara Asean, yaitu Malaysia dan Singapura serta diapit oleh 3 (tiga) provinsi, dengan batas sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Aceh
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Malaka
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Riau dan Provinsi Sumatera Barat
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia

Di wilayah tengah provinsi berjajar Pegunungan Bukit Barisan. Di pegunungan ini terdapat beberapa wilayah yang menjadi kantong-kantong konsentrasi penduduk. Daerah di sekitar Danau Toba dan Pulau Samosir, merupakan daerah padat penduduk yang menggantungkan hidupnya kepada danau ini. Pesisir barat merupakan wilayah yang cukup sempit, dengan komposisi penduduk yang terdiri dari masyarakat Batak, Minangkabau, dan Aceh. Namun secara kultur dan etnolinguistik, wilayah ini masuk ke dalam budaya dan Bahasa Minangkabau.

Pada awal tahun 1949, dilakukan kembali reorganisasi pemerintahan di Sumatera. Dengan Keputusan Pemerintah Darurat R.I. Nomor 22/Pem/PDRI pada tanggal 17 Mei 1949, jabatan Gubernur Sumatera Utara ditiadakan. Selanjutnya

dengan Ketetapan Pemerintah Darurat R.I. pada tanggal 17 Desember 1949, dibentuk Provinsi Aceh dan Provinsi Tapanuli/Sumatera Timur. Kemudian, dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 5 Tahun 1950 pada tanggal 14 Agustus 1950, ketetapan tersebut dicabut dan dibentuk kembali Provinsi Sumatera Utara. Dengan Undang-Undang R.I. No. 24 Tahun 1956 yang diundangkan pada tanggal 7 Desember 1956, dibentuk Daerah Otonom Provinsi Aceh, sehingga wilayah Provinsi Sumatera Utara sebahagian menjadi wilayah Provinsi Aceh.

Wilayah Sumatera Utara terdiri dari daerah pantai, dataran rendah dan dataran tinggi serta pegunungan Bukit Barisan yang membujur di tengah-tengah dari Utara ke Selatan. Kemiringan tanah antara 0-12% seluas 65,51% seluas 8,64% dan di atas 40% seluas 24,28%, sedangkan luas Wilayah Danau Toba 112.920 ha atau 1,57%. Berdasarkan topografinya, Sumatera Utara dibagi atas 3 (tiga) bagian yaitu bagian Timur dengan keadaan relatif datar, bagian tengah bergelombang sampai berbukit dan bagian Barat merupakan dataran bergelombang.

Wilayah Pantai Timur yang merupakan dataran rendah seluas 24.921,99 km² atau 34,77% dari luas wilayah Sumatera Utara adalah daerah yang subur, kelembaban tinggi dengan curah hujan relatif tinggi pula. Wilayah ini memiliki potensi ekonomi yang tinggi sehingga cenderung semakin padat karena arus migrasi dari wilayah Pantai Barat dan dataran tinggi. Banjir juga sering melanda wilayah tersebut akibat berkurangnya pelestarian hutan, erosi dan pendangkalan sungai. Pada musim kemarau terjadi pula kekurangan persediaan air disebabkan kondisi hutan yang kritis.

Wilayah dataran tinggi dan wilayah Pantai Barat seluas 46.758,69 km² atau 65,23% dari luas wilayah Sumatera Utara, yang sebagian besar merupakan pegunungan, memiliki variasi dalam tingkat kesuburan tanah, iklim, topografi dan kontur serta daerah yang struktur tanahnya labil. Beberapa danau, sungai, air terjun dan gunung berapi dijumpai di wilayah ini serta sebagian wilayahnya tercatat sebagai daerah gempa tektonik dan vulkanik.

Iklim di Sumatera Utara termasuk iklim tropis yang dipengaruhi oleh angin Passat dan angin Muson. Kelembaban udara rata-rata 78%-91%, curah hujan (800-4000) mm/ tahun dan penyinaran matahari 43%.

4.1.2. Visi dan Misi Provinsi Sumatera Utara

Visi : Sumatera Utara Yang Maju, Aman dan Bermartabat

Misi :

- a. Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat Dalam Kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, pendidikan yang baik, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau.
- b. Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat Dalam Politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil, terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan, dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis.

- c. Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat Dalam Pendidikan karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing, dan mandiri.
- d. Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat Dalam Pergaulan karena terbebas dari judi, narkoba, prostitusi, dan penyeludupan, sehingga menjadi teladan di Asia Tenggara dan Dunia.
- e. Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat Dalam Lingkungan karena ekologi yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya, berperikemanusiaan, dan beradab.

Berdasarkan Visi dan Misi tersebut, maka telah ditetapkan pula Prioritas Pembangunan yang ditunjukkan pada :

- a. Peningkatan kesempatan kerja dan berusaha melalui penyediaan lapangan pekerjaan.
- b. Peningkatan dan pemenuhan akses pendidikan.
- c. Pembangunan infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan.
- d. Penyediaan layanan kesehatan yang berkualitas.
- e. Peningkatan daya saing melalui sektor agraris dan pariwisata.

4.2. Hasil Penelitian

4.2.1. Statistik Deskriptif

Statistik Deskriptif adalah ilmu yang mempelajari cara-cara pengumpulan, penyusunan, dan penyajian data suatu penelitian. Statistik deskriptif memberikan penjelasan mengenai nilai minimum, nilai maksimum, dan nilai rata-rata (mean), nilai standar deviasi data dari variabel independen dan variabel dependen yang

digunakan dalam penelitian. Tujuannya adalah untuk memudahkan orang lain dalam membaca data dan memahami maksudnya.

Tabel 4.1 Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum
PDRB	115	603.55	24715.67
PAD	115	7223691.000	252663016.000
DAU	115	48689858.000	1230816187.000
DAK	115	0	404798656.000
BELANJA_MODAL	115	87060355.000	293713451.000
Valid N (listwise)	115		

Sumber: Diolah Oleh peneliti (Output SPSS), 2020

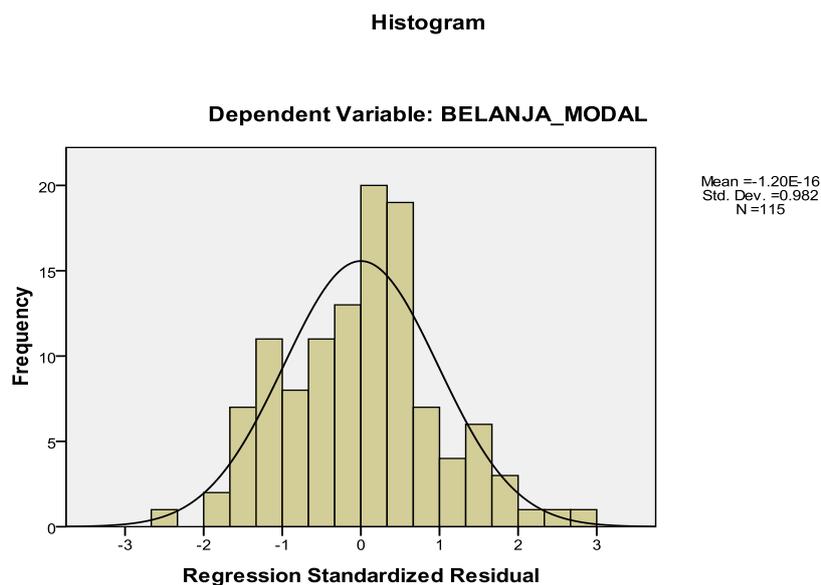
Berdasarkan data dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa:

- a. Variabel PDRB (X1) pada tahun 2013-2017 memiliki sampel (n) sebanyak 115 dengan nilai minimum Rp603.55 terdapat di Pakpak Bharat pada tahun 2013 sedangkan PDRB di Sumatera Utara dengan nilai maximum Rp24.715.67 terdapat di Simalungun pada tahun 2017.
- b. Variabel Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2013-2017 memiliki sampel (n) sebanyak 115 dengan nilai minimum sebesar Rp722.3691.000 terdapat di Nias Barat Pada tahun 2013 Sedangkan Pendapatan Asli Daerah maximum di pemerintahan Sumatera Utara dengan nilai sebesar Rp252.663.016.000 terdapat Simalungun pada tahun 2017.
- c. Variabel Dana Alokasi Umum memiliki sampel (n) sebanyak 115 dengan nilai minimum sebesar Rp48.689.858.000 terdapat di Humbang Hasundutan pada tahun 2014. Sedangkan Dana Alokasi Umum maximum

Rp1.230.816.187.000 di pemerintahan Sumatera Utara terdapat di Simalungun Pada tahun 2016.

- d. Variabel Dana Alokasi Khusus memiliki sampel (n) sebanyak 115 dengan nilai minimum 0 terdapat di Toba Samosir pada tahun 2016 sedangkan Dana Alokasi Khusus maximum di pemerintahan Sumatera Utara Rp404.798.656.000 terdapat di Simalungun pada tahun 2017.
- e. Variabel Belanja Modal memiliki sampel (n) sebanyak 115 dengan nilai minimum sebesar Rp87.060.355.000 terdapat di Sibolga pada tahun 2013 sedangkan Belanja Modal maximum di Pemerintahan Sumatera Utara Rp293.713.451.000 terdapat di Simalungun pada tahun 2017.

4.2.2. Uji Normalitas



Sumber: Diolah Oleh peneliti (Output SPSS), 2020

Berdasarkan histogram normalitas P-P Plot diketahui bahwa kurva histogram teletak pada garis vertikal -3 dan 3 sedangkan garis horizontal 0 dan 15, maka dapat disimpulkan bahwa data telah berdistribusi normal. Berikut ini tabel Kolmogrov.

Tabel 4.2 Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		115
Normal Parameters ^{a, b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	3.88838734E7
Most Extreme Differences	Absolute	.054
	Positive	.054
	Negative	-.049
Kolmogorov-Smirnov Z		.584
Asymp. Sig. (2-tailed)		.885

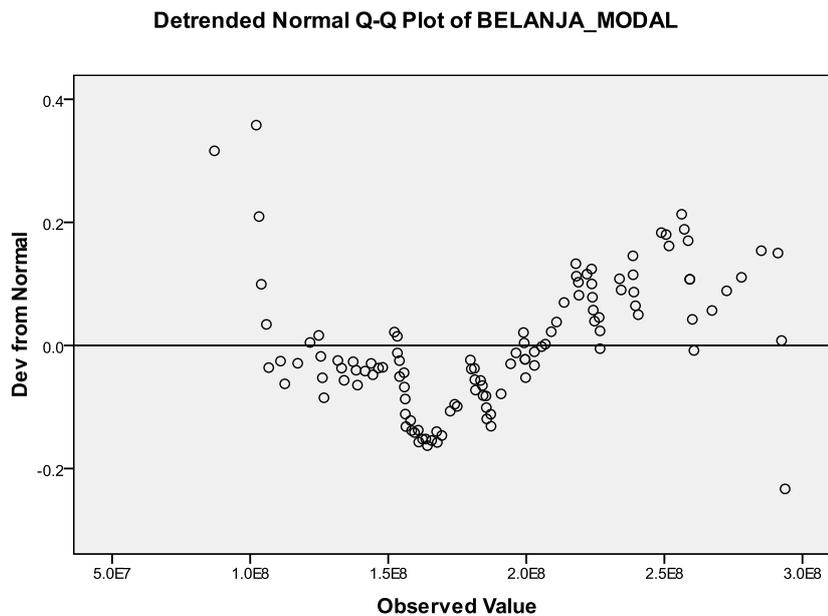
a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Diolah Oleh peneliti (Output SPSS), 2020

Berdasarkan tabel uji normalitas dengan *Kolmogrov-Smirnov* (K-S) diatas, diketahui bahwa nilai signifikan atau probabilitas sebesar 0,885 Oleh karena nilai signifikan lebih besar dari pada tingkat signifikan (>0.05), maka dapat disimpulkan bahwa data telah berdistribusi normal.

4.2.3. Uji Heteroskedastisitas



Sumber: Diolah Oleh peneliti (Output SPSS), 2020

Berdasarkan tabel uji heteroskedastisitas berdasarkan output diatas dapat di ketahui bahawa titik-titik data penyebar diatas dan dibawah atau disekitar angka 0, titik-titik tidak mengumpul hanya diatas atau dibawah saja, penyebaran titik-titik data tidak membentuk pola bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar kembali, penyebaran titik-titik data tidak berpola. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastistas, hingga model regresi yang baik dan ideal dapat terpenuhi.

4.2.4. Uji Auto Korelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya. Pada pengujian autokorelasi digunakan nilai *Durbin Watson* (D-W) untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi pada model regresi. Hasil dari uji autokorelasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.3 Uji Auto Korelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.609 ^a	.371	.349	3.958454E7	2.004

a. Predictors: (Constant), DAK, PDRB, PAD, DAU

b. Dependent Variable: BELANJA_MODAL

Sumber: Diolah Oleh peneliti (Output SPSS), 2020

Berdasarkan tabel diatas nilai *Durbin Watson* (DW) sebesar 2.004 lebih besar dari batas (dU) yakni 1.7683 dan kurang dari (4-du) $4-1.7683=2.2317$. Maka sebagaimana dasar pengambilan keputusan dalam uji *Durbin Watson* diatas dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi atau sudah bebas dari uji autokorelasi. Dengan demikian maka analisis regresi linear berganda untuk uji hipotesis penelitian diatas dapat dilakukan atau dilanjutkan.

4.2.5. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel (indenpenden). Uji multikolinieritas dapat dilakukan dengan menggunakan model regresi dan melakukan uji korelasi antar variabel independen dengan melihat nilai tolerence dan *variance inflation factor* (VIF) dari hasil analisis dengan menggunakan SPSS. Apabila nilai *tolerence value* $> 0,10$ atau $VIF < 10$ maka disimpulkan tidak terjadi multikolinieritas. Uji multikolinieritas dari hasil data yang telah didistribusikan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.4 Uji Multikolineritas

Coefficients ^a		
Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1(Constant)		
PDRB	0.571	1.750
PAD	0.512	1.955
DAU	0.367	2.725
DAK	0.638	1.568

a. Dependent Variable: BELANJA_MODAL
 Sumber: Diolah Oleh peneliti (Output SPSS), 2020

Diketahui bahwa nilai tolerance variabel PDRB sebesar $0.571 > 0.10$, variabel DAK sebesar $0.638 > 0.10$, variabel DAU sebesar $0.367 > 0.10$ dan variabel PAD sebesar $0.512 > 0.10$ Sedangkan angka *Variance Inflation Factor* (VIF) yang memiliki nilai lebih kecil dari 10 antara lain PDRB sebesar $1.750 < 10$, DAK sebesar $1.568 < 10$, DAU sebesar $2.725 < 10$ dan PAD sebesar $1.955 < 10$ sehingga tidak terjadi multikolineritas atau sudah bebas dari uji multikolineritas.

4.2.6. Pengujian *goodnest of fit*

a. Uji Regresi Linear Berganda

Dalam Penelitian ini, peneliti menggunakan analisis regresi linear berganda sebagai alat analisis. Setelah dilakukannya uji asumsi klasik sebagai syarat memenuhi layaknya analisis regresi linear, maka selanjutnya dilakukan analisis linear berganda. Berikut hasil analisis yang ditampilkan dalam tabel berikut.

Tabel 4.5 Uji Regresi Linear Berganda
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.460E8	1.142E7		12.790	.000
	PDRB	2169.474	834.333	.260	2.600	.011
	PAD	-.129	.135	-.100	-.951	.344
	DAU	-.001	.033	-.005	-.040	.968
	DAK	.377	.067	.535	5.649	.000

a. Dependent Variable: BELANJA_MODAL

Sumber: Diolah Oleh peneliti (Output SPSS), 2020

Berdasarkan tabel hasil analisis regresi linear berganda diatas maka diperoleh persamaan berikut:

$$BM = 0.00000001.46 + 2169.474 \text{ PDRB} - 0.129 \text{ PAD} - 0.001 \text{ DAU} + 0.377 \text{ DAK}$$

Keterangan :

- a. Konstanta sebesar 0.00000001.46 mengindikasikan bahwa secara umum apabila domestik regional bruto (PDRB), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) bernilai konstan atau tidak berubah maka Belanja Modal (BM) nilainya sebesar 0.00000001.46.
- b. Koefisien regresi untuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar 2169.474 artinya jika variabel independen lainnya tetap mengalami kenaikan maka Belanja Modal (BM) akan mengalami kenaikan sebesar

2169.474, koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan Belanja Modal (BM). Semakin naik Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) maka semakin naik pula Belanja Modal (BM).

- c. Koefisien regresi untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar -0.129 artinya jika variabel independen lainnya tetap dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami kenaikan maka Belanja Modal (BM) mengalami penurunan sebesar -0.129 , koefisien bernilai negatif artinya terjadi hubungan negatif antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Belanja Modal (BM), semakin naik Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka semakin turun Belanja Modal (BM).
- d. Koefisien regresi untuk Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar -0.001 artinya jika variabel independen lainnya tetap dan Dana Alokasi Umum (DAU) mengalami kenaikan maka Belanja Modal (BM) mengalami penurunan sebesar -0.001 , koefisien bernilai negatif artinya terjadi hubungan negatif antara Dana Alokasi Umum (DAU) dengan Belanja Modal (BM), semakin naik Dana Alokasi Umum (DAU) maka semakin turun Belanja Modal (BM).
- e. Koefisien regresi untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 0.377 artinya jika variabel independen lainnya tetap mengalami kenaikan maka Belanja Modal (BM) akan mengalami kenaikan sebesar 0.377 , koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan Belanja Modal (BM). Semakin naik Dana Alokasi Khusus (DAK) maka semakin naik pula Belanja Modal (BM).

b. Uji F

Tabel 4.6 Uji FANOVA^b

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1.018E17	4	2.546E16	16.246	.000 ^a
	Residual	1.724E17	110	1.567E15		
	Total	2.742E17	114			

a. Predictors: (Constant), DAK, PDRB, PAD, DAU

b. Dependent Variable: BELANJA_MODAL

Sumber: Diolah Oleh peneliti (Output SPSS), 2020

Berdasarkan tabel diatas diperoleh nilai F hitung sebesar signifikan 0.00. karena nilai sig. $0.00 < 0.05$, maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji F dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima atau dengan kata lain H_a diterima dan H_0 ditolak, artinya PDRB, PAD, DAU dan DAK secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal pada Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara.

c. Uji t

Untuk mengetahui masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen, maka dilakukan uji t. Uji t dilakukan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen yaitu PDRB, PAD, DAU dan DAK terhadap Belanja Modal. Untuk menguji pengaruh parsial tersebut dapat dilakukan dengan cara berdasarkan nilai signifikan. Jika nilai signifikan lebih kecil dari 0.05 atau 5% maka hipotesis yang diajukan diterima atau signifikan, apabila nilai signifikan lebih besar dari 0.05 atau 5% maka hipotesis ditolak atau dikatakan tidak signifikan. Berikut adalah tabel hasil pengolahan datanya:

Tabel 4.7 Uji T**Coefficients^a**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.460E8	1.142E7		12.790	.000
	PDRB	2169.474	834.333	.260	2.600	.011
	PAD	-.129	.135	-.100	-.951	.344
	DAU	-.001	.033	-.005	-.040	.968
	DAK	.377	.067	.535	5.649	.000

a. Dependent Variable: BELANJA_MODAL

Sumber: Diolah Oleh peneliti (Output SPSS), 2020

1. Berdasarkan nilai t hitung variabel PDRB dengan nilai sig .011 < 0.05, sehingga Ha diterima dan H0 ditolak. Artinya PDRB secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal pada Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara.
2. Berdasarkan nilai t hitung variabel PAD dengan nilai sig .344 > 0.05, sehingga Ha diterima dan H0 ditolak. Artinya PAD secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal pada Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara.
3. Berdasarkan nilai t hitung variabel DAU dengan nilai sig .968 > 0.05, sehingga Ha ditolak dan H0 diterima. Artinya DAU secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal pada Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara.
4. Berdasarkan nilai t hitung variabel DAK dengan nilai sig .000 < 0.05, sehingga Ha ditolak dan H0 diterima. Artinya DAK secara

parsial berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal pada Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara.

d. Uji R *Square* Koefisien Determinasi (R²)

Uji Koefisien Determinasi (R²) ini digunakan untuk menggambarkan kemampuan model menjelaskan variasi yang terjadi dalam variabel dependen yang dinyatakan dalam persentase. Nilai R² yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati 1 (satu) berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Besarnya nilai koefisien determinasi (R²) dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.8 Uji R *Square*

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.609 ^a	.371	.349	3.958454E7

a. Predictors: (Constant), DAK, PDRB, PAD, DAU

b. Dependent Variable: Belanja_Modal

Sumber: Diolah Oleh peneliti (Output SPSS), 2020

Pada model summary diatas, nilai R sebesar 0.349 menunjukkan bahwa korelasi atau hubungan antara Belanja Modal dengan PDRB, PAD, DAU dan DAK memiliki keeratan hubungan yang cukup erat. Sedangkan nilai R square atau koefisien determinasi adalah 0.349. Nilai ini mengindikasikan bahwa 34.9 % artinya variasi Belanja Modal (Y) dapat dijelaskan oleh variasi variabel PDRB, PAD, DAU dan DAK. Sedangkan sisanya sebesar 66.1% dipengaruhi variabel lain yang tidak dimasukkan kedalam model atau tidak diteliti yaitu variabel retribusi daerah, pajak daerah, rasio kemandirian dan penganguran.

4.3. Pembahasan

Belanja modal adalah pengeluaran pemerintah yang manfaatnya dapat digunakan dan dirasakan lebih dari satu tahun anggaran dan akan menambah aset dan kekayaan yang berakibat efektifitas perekonomian disuatu daerah. Belanja modal dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok, kelompok pertama adalah belanja publik yaitu belanja yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat umum, misalnya pembangunan jalan dan jembatan. Kelompok yang kedua adalah belanja aparatur yaitu belanja yang manfaatnya tidak langsung dirasakan langsung oleh masyarakat tetapi dirasakan langsung oleh aparatur, misalnya pembangunan gedung dewan dan lain-lain.

Belanja modal adalah komponen belanja langsung dalam anggaran pemerintah yang menghasilkan output berupa aset tetap. Dalam pemanfaatan aset tetap yang dihasilkan tersebut, ada yang bersinggungan langsung dengan pelayanan publik atau dipakai oleh masyarakat (seperti jalan, jembatan, trotoar, gedung olah raga, stadion, jogging track, halte, dan rambu lalu lintas) dan ada yang tidak langsung dimanfaatkan oleh publik (seperti gedung kantor pemerintahan). Dalam perspektif kebijakan publik, sebagian besar belanja modal berhubungan dengan pelayanan publik, sehingga pada setiap anggaran tahunan jumlahnya semestinya relatif besar.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.06/2007 tentang Bagan Akun Standar, menjelaskan bahwa belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan

oleh pemerintah (Isti & Titik, 2016). Prinsipnya alokasi belanja modal dibuat untuk menghasilkan aset tetap milik pemerintah daerah yang sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah dan atau masyarakat di daerah bersangkutan. Dalam perspektif penganggaran partisipatif, keterlibatan masyarakat diharapkan dapat memberikan masukan penting dalam memilih aset tetap yang akan diperoleh dari pelaksanaan anggaran belanja modal.

Hampir semua anggaran belanja modal dikeluarkan berdasarkan komitmen adanya pengeluaran dalam dan untuk jangka panjang, hasil penelitian bahwa PDRB secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal pada Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Nova Rudiansah menunjukkan bahwa PDRB harga konstan berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Sedangkan Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 huruf c Permendagri No 59 Tahun 2007 tentang perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pengelolaan Keuangan Daerah digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Selanjutnya pada pasal 53 ayat 2 Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 ditentukan bahwa nilai aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/ pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.

Kemudian pada pasal 53 ayat 4 Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 disebutkan bahwa Kepala Daerah menetapkan batas minimal kapitalisasi sebagai dasar pembebanan belanja modal selain memenuhi batas minimal juga

pengeluaran anggaran untuk belanja barang tersebut harus memberi manfaat lebih satu periode akuntansi bersifat tidak rutin. Ketentuan hal ini sejalan dengan PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan khususnya PSAP No. 7, yang mengatur tentang akuntansi tetap.

Perkembangan Daerah dapat dilihat dari PDRB (*Product Domestic Regional Bruto*) yang pada dasarnya merupakan nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit dalam suatu daerah tertentu atau merupakan nilai jumlah barang atau jasa akhir (neto) yang dihasilkan oleh suatu unit ekonomi.

Menurut Sularno (2013) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Penyajian angka-angka dalam PDRB di bedakan menjadi dua, yaitu PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah dari barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga yang berlaku pada tahun berjalan setiap tahun, sedangkan PDRB atas harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang di hitung dengan memakai harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB atas dasar tahun berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ketahun.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan suatu indikator yang menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan atau balas jasa suatu faktor produksi di suatu daerah. PDRB ini terdiri dari PDRB Rill dan PDRB Nominal. PDRB Rill nilainya diukur atas dasar harga konstan,

sedangkan PDRB Nominal adalah PDRB yang dinilai atas dasar harga berlaku. Dalam menghitung PDRB suatu daerah baik PDRB atas dasar harga berlaku maupun PDRB atas harga konstan, sektor-sektor produksi yang dihitung terdiri dari 9 (sembilan) sektor, yaitu: (i) Pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan dan perkebunan; (ii) Pertambangan dan penggalan; (iii) Industri pengolahan; (iv) Listrik, gas dan air bersih; (v) Bangunan; (vi) Perdagangan, hotel dan restoran; (vii) Pengangkutan dan Komunikasi; (viii) Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; dan (ix) Jasa-jasa (Abrar (2010) dalam Setyowati dan Suparwati (2012)). Pada Tahun 2010, sektor-sektor di Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mengalami perubahan. (SYAMSINAR, 2013)

PAD secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal pada Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Eva Sulistyorini meunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pembiayaan untuk anggaran belanja modal. PAD didapatkan dari iuran langsung dari masyarakat, seperti pajak, restribusi, dan lain sebagainya. Tanggung jawab agen (pemerintah daerah) kepada prinsipal (masyarakat) adalah memberikan pelayanan publik (*public service*) yang baik kepada masyarakat melalui anggaran belanja modal, karena masyarakat telah memberikan sebagian uangnya kepada pemerintah daerah. Bentuk pelayanan publik yang diberikan pemerintah kepada masyarakat dengan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai di daerahnya.

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan penting bagi daerah daerah dalam memenuhi belanjanya. Besar kecilnya belanja modal akan

ditentukan dari besar kecilnya PAD, sehingga jika pemerintah daerah ingin meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat dengan jalan meningkatkan belanja modal maka pemerintah daerah harus berusaha keras untuk menggali PAD yang sebesar-besarnya. Pemerintah daerah juga bertanggung jawab kepada masyarakat karena masyarakat memberikan sebagian uangnya kepada pemerintah daerah melalui pajak, retribusi, dan lain-lain. Dengan demikian, ada hubungan antara Pendapatan Asli Daerah dengan Belanja Modal.

Teori Stewardship menjelaskan bahwa pemerintah sebagai penatalayanan. Dimana pemerintah daerah bertanggung jawab kepada pemerintah pusat agar mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, dapat dipercaya, berintegritas tinggi dan memiliki kejujuran. Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat dari kemampuan

PP No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa APBD disusun akan mengalokasikan belanja modal maka harus sesuaikan dengan kebutuhan daerah dengan pertimbangan PAD yang diterima. Salah satu ciri utama suatu daerah mampu melaksanakan otonomi adalah kemampuan keuangan daerah, yang berarti daerah memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan penting bagi daerah daerah dalam memenuhi belanjanya. Besar kecilnya belanja modal akan ditentukan dari besar kecilnya PAD, sehingga jika pemerintah daerah ingin meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat dengan jalan meningkatkan belanja modal maka pemerintah daerah harus berusaha keras untuk

menggali PAD yang sebesar-besarnya. sesuai dengan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan daerah, yang diartikan bahwa Pemerintah Daerah pemerintah daerah menerima amanah menyajikan informasi bagi pemerintah pusat, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui alokasi belanja modal.

DAU secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal pada Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Sheila Ardhian Nuarisa menunjukkan bahwa DAU berpengaruh signifikan terhadap belanja modal dan memiliki arah koefisien yang positif sesuai dengan hipotesis awal. Hipotesis tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi DAU maka pengeluaran pemerintah atas belanja modal pun akan semakin tinggi sedangkan DAU semakin rendah menunjukkan belanja modal tidak berpengaruh dalam pembangunan infrastruktur.

DAU adalah salah satu dana perimbangan yang menjadi bagian dari sumber pendapatan daerah. DAU dialokasikan berdasarkan presentase tertentu dari pendapatan dalam negeri neto yang ditetapkan dalam APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran daerah masing-masing dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU untuk suatu daerah ditetapkan berdasarkan kriteria tertentu yang menekankan pada aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang formula dan perhitungan DAU-nya ditetapkan sesuai undang-undang.

Menurut UU No. 25 Tahun 1999, alokasi DAU ke suatu daerah ditetapkan berdasarkan dua faktor, yaitu potensi perekonomian dan kebutuhan daerah.

Kebutuhan daerah (*fiscal need*) dicerminkan oleh jumlah penduduk, luas wilayah, keadaan geografis, dan tingkat pendapatan masyarakat. Potensi perekonomian antara lain dicerminkan oleh potensi penerimaan pemerintah daerah (*fiscal capacity*), seperti dari hasil industri dan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan PDRB.

Potensi perekonomian antara lain dicerminkan oleh potensi penerimaan pemerintah daerah (*fiscal capacity*), seperti dari hasil industri dan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan PDRB. Berdasarkan Undang-Undang tersebut Dana Alokasi Umum ditetapkan sekurang kurangnya 26% dari penerimaan dalam negeri yang kemudian disalurkan kepada provinsi sebesar 10% dan kabupaten atau kota sebesar 90% dari total DAU. Dana Alokasi Umum merupakan dana yang bersifat “*Block Grant*” yang artinya ketika dana tersebut diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah bebas untuk menggunakan dan mengalokasikan dana ini sesuai prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

Teori stewardship memandang manajemen sebagai pihak memenuhi kebutuhan stakeholder. Konsep ini didasarkan pada asas kepercayaan pada pihak yang diberikan wewenang, dimana manajemen dalam suatu organisasi dicerminkan sebagai good steward yang melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasannya secara penuh tanggung jawab. Pemerintah daerah sebagai lembaga yang dapat dipercaya untuk bertindak sesuai kepentingan publik dengan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tepat. Pertanggung jawaban keuangan yang diamanahkan kepadanya mampu tercapai tujuan ekonominya dengan baik,

pelayanan publik maupun kesejahteraan masyarakatnya tercapai secara maksimal. Stewards mengarahkan semua kemampuan dan ahlinya dalam mengefektifkan pengendalian intern untuk dapat menghasilkan laporan informasi keuangan berkualitas.

Dana Alokasi Umum yaitu dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dibeberapa daerah peran dana alokasi umum sangat signifikan karena kebijakan belanja daerah lebih didominasi oleh jumlah dana alokasi umum dari pada pendapatan asli daerah. Pemerintah pusat mengharapkan dengan adanya desentralisasi fiskal pemerintah daerah lebih mengoptimalkan kemampuannya dalam mengelola sumber daya yang dimiliki sehingga tidak hanya mengandalkan DAU.

Setiap transfer dana alokasi umum yang diterima daerah akan ditunjukkan untuk belanja pemerintah daerah termasuk untuk belanja modal, maka tidak jarang apabila pemerintah daerah menetapkan rencana pendapatan secara pesimis dan rencana belanja cenderung optimis supaya transfer dana alokasi umum yang diterima daerah lebih besar. Transfer dana alokasi umum dari Pemerintah Pusat maka daerah bisa lebih focus untuk menggunakan pendapatan asli daerah yang dimiliki untuk membiayai belanja modal yang menunjang tujuan pemerintah yaitu meningkatkan pelayanan publik.

DAU akan memberikan kepastian bagi daerah dalam memperoleh sumber pembiayaan untuk membiayai kebutuhan pengeluaran yang menjadi tanggung jawab masing-masing daerah. DAU diberikan berdasarkan celah fiskal dan alokasi dasar. Celah fiskal merupakan kebutuhan daerah yang dikurangi dengan kapasitas

fiskal daerah, kebutuhan daerah dihitung berdasarkan variabel-variabel yang ditetapkan undang-undang sedangkan perhitungan kapasitas fiskal didasarkan atas Penerimaan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil yang diterima daerah. Sementara Alokasi Dasar dihitung berdasarkan gaji PNS daerah.

DAK secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal pada Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Mohamad Sarif, bahwa variabel Dana Alokasi Khusus mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah. Karena Dana Alokasi Khusus adalah merupakan dana yang berasal dari APBN dan dialokasikan ke daerah Kabupaten/Kota untuk membiayai kebutuhan tertentu yang sifatnya khusus, tergantung tersedianya dana dalam APBN yang diprioritaskan untuk membantu daerah-daerah dengan kemampuan keuangan di bawah rata-rata nasional, dalam rangka mendanai kegiatan penyediaan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat yang telah merupakan urusan daerah.

Dana alokasi khusus (DAK) merupakan salah satu mekanisme transfer keuangan Pemerintah Pusat ke daerah yang bertujuan antara lain untuk meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana fisik daerah sesuai prioritas nasional serta mengurangi kesenjangan laju pertumbuhan antar daerah dan pelayanan antar bidang (Subekan, 2012). DAK memainkan peran penting dalam dinamika pembangunan sarana dan prasarana pelayanan dasar di daerah karena sesuai dengan prinsip desentralisasi tanggung jawab dan akuntabilitas bagi penyediaan pelayanan dasar masyarakat telah dialihkan kepada pemerintah daerah.

Dana transfer dari pemerintah selain Dana Alokasi Umum juga Dana Alokasi Khusus. Pemanfaatan dana alokasi khusus diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang. Dengan adanya pengalokasian dana alokasi khusus diharapkan dapat mempengaruhi belanja modal, karena dana alokasi khusus cenderung menambah aset tetap yang dimiliki pemerintah guna meningkatkan pelayanan publik.

Pengaturan pemanfaatan dana alokasi khusus yang dialokasikan untuk mendanai kebutuhan fisik dengan tujuan dapat meningkatkan sarana dan prasarana guna mendukung laju pertumbuhan ekonomi, sesuai amanat Peraturan Menteri Keuangan tersebut seharusnya Pemerintah Daerah dapat meningkatkan alokasi belanja pembangunan infrastrukturnya lebih tinggi dengan pendanaan yang berasal dari Dana Alokasi Khusus tersebut tentunya akan berimbas pada peningkatan pengalokasian belana untuk fisik yang dalam APBD terakomodir dalam jenis barang modal. (Firnandi & Nur, 2016)

PDRB, PAD, DAU dan DAK secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal pada Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Eva Sulistyorini dengan pengujian secara simultan menunjukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum, berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

Pada model *summary* diatas, nilai R sebesar 0.349 menunjukkan bahwa korelasi atau hubungan antara Belanja Modal dengan PDRB, PAD, DAU dan DAK memiliki keeratan hubungan yang cukup erat. Sedangkan nilai R square atau koefisien determinasi adalah 0.349. Nilai ini mengindikasikan bahwa 34.9%

artinya variasi Belanja Modal (Y) dapat dijelaskan oleh variasi variabel PDRB, PAD, DAU dan DAK. Sedangkan sisanya sebesar 66.1 % dipengaruhi variabel lain yang tidak dimasukkan kedalam model atau tidak diteliti yaitu variabel retribusi daerah, pajak daerah, rasio kemandirian dan penganguran.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan oleh peneliti mengenai pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapaatan Asli Daerah Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Di Pemerintahan Kota/Kabupaten Provinsi Sumatera Utara , maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Secara parsial bahwa PDRB dan DAK berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal sedangkan PAD dan DAU tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal di Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara.
- b. PDRB, PAD, DAU dan DAK secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal pada Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara.
- c. Nilai *adjusted R square* adalah 34.9% artinya variasi Belanja Modal (Y) dapat dijelaskan oleh variasi variabel PDRB, PAD, DAU dan DAK. Sedangkan sisanya sebesar 66.1% dipengaruhi variabel lain yang tidak dimasukkan kedalam model atau tidak diteliti yaitu variabel retribusi daerah, pajak daerah, rasio kemandirian dan pengurangan.

5.2. Saran

1. Bagi Pemerintah Kabupaten/Kota Sumatera Utara

Diharapkan dapat menjadi media untuk mengaplikasikan berbagai teori yang di pelajari, sehingga akan berguna dalam pengembangan pemahaman, penalaran, pengalaman , juga berguna bagi pengembangan

ilmu pengetahuan sehingga dapat di kembangkan lebih lanjut dalam penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Bagi Universitas Panca Budi

Menambah informasi dan pengetahuan mengenai Pertumbuhan Ekonomi,. Pendapatan Asli Daerah Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Di Perpustakaan Panca Budi

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan kepada peneliti selanjutnya agar dapat meneliti lebih dalam lagi tentang Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khuss Terhadap Belaja Modal

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, (2018) Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, Luas Wilayah, Serta Belanja Barang Dan Jasa Terhadap Belanja Modal. *Tesis, Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi UNIB.*
- Ahmad, (2014) *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan. PT. Raja Grafindo Persada.* Jakarta.
- Aliah, N. (2020). *The Role Of E-Filing In Improving Taxpayer Compliance In Indonesia. Accounting and Business Journal*, 2(1), 1-9.
- Ardhani, P. (2011). Pengaruh Pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pengalokasian Anggaran
- Arnita, V. (2018). Pengaruh Orangtua Terhadap Mahasiswa Akuntansi Dalam Pemilihan Karir Menjadi Profesi Akuntan. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi*, 4(2), 19-23.
- Arwati, (2013). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana lokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat. Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi Terapan 2013 (SEMANTIK 2013).* 498-507.
- Barus, M. D. B., & Hakim, A. (2020). Analisis Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika melalui Metode *Practice Rehearsal Pairs* pada Siswa SMA Al-Hidayah Medan. *Biormatika: Jurnal ilmiah fakultas keguruan dan ilmu pendidikan*, 6(1), 74-78.
- Boediono. (2010). *Seri Sinopsis Pengantar Ekonomi No.1 Ekonomi Mikro.* Edisi Kedua. Yogyakarta : BPFE
- Chrisna, H. (2018). Analisis Manajemen Persediaan Dalam Memaksimalkan Pengendalian Internal Persediaan Pada Pabrik Sepatu Ferradini Medan. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 8(2), 82-92.
- Chrisna, H., Karin, A., & Hasibuan, H. A. (2020). Analisis Sistem Dan Prosedur Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) Dengan Akad Pembiayaan Murabahah Pada PT. BANK BRI Syariah Cabang Medan. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 11(1), 156-166.

- Erlina, (2008) *Ilmu Makro Ekonomi, Edisi 17(terjemahan)*. Penerbit Media Global Edukasi. Jakarta.
- Fadly, Y. (2011). *An Analysis Of Main Character Conflicts In M.J. Hyland's Carry Me Down*.
- Faridi, M. Z. (2011). Contribution of Fiscal Decentralization to Economic growth: Evidence from Pakistan. *Pakistan Journal of Social Sciences (PJSS)*, Vol. 31, No. 1 (June 2011):1-13
- Febriana,(2015). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Belanja Modal pada Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. Vol.4 No.9 2015. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya
- Ghozali, I. (2011). *Analisis Multivariat dengan Program SPSS*, Edisi Ketiga. Jakarta. PT. Elex.
- Hasan, T.I.B. (2012). Pengaruh Belanja Modal Pemerintah dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Penduduk Miskin di Aceh. *Journal SAINS Riset*,1(1).
- Herdiansyah, H. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jkt. Salemba Humanika.
- Hernawaty, H., Chrisna, H., & Noviani, N. (2020). Transaksi Valas Dalam Perspektif Konvensional Dan Syariah. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 11(1), 1-17.
- Ikhlas, (2011) *Otonomi Daerah dan Desentralisasi. Edisi 1*, Pustaka Setia. Bandung.
- Koncoro, (2014) *Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan Strategi dan Peluang*. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Kusuma, H. 2016. Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia". *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, Vol. 9, No. 1
- Malikhah, I. (2019). Pengaruh Mutu Pelayanan, Pemahaman Sistem Operasional Prosedur Dan Sarana Pendukung Terhadap Kepuasan Mahasiswa Universitas Pembangunan Panca Budi. *JUMANT*, 11(1), 67-80.
- Maulida, A. d. 2011. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kemandirian Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi Kasus di 36 Kabupaten/Kota di Kalimantan)". *Jurnal Ilmu Ekonomi*, Vol., No.1

- Nasution, A. P. (2017). Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Desa di Kecamatan Munte Kabupaten Karo.
- Nasution, D. A. D., & Ramadhan, P. R. (2019). Pengaruh Implementasi *E-Budgeting* Terhadap Transparansi Keuangan Daerah Di Indonesia. *E-Jurnal Akuntansi*, 28(1), 669-693.
- Nasution, N. A., & Sari, W. (2020). Pengaruh Ukuran Perusahaan (*Firm Size*) Dan Profitabilitas Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI). *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 11(1), 76-83.
- Nindia, N. L. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Serta Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat. *Journal Accounting And Finance* .
- Nordiawan, D. (2012). *Anggaran disuatu pemerintahan*. Jakarta : Salemba Empat.
- Nisa, (2017) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Di Kabupaten Dan Kota Provinsi Sulawesi Tengah. *Tesis, Magister Manajemen*. Universitas Tadulako. Palu.
- Nuarisa, Ardhan Sheila. (2013). Pengaruh PAD, DAU dan DAK Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Accounting Analysis Journal* Vol. 2, No.1 Universitas Negeri Semarang.
- Oktavia, (2018) Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal (Survei Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Tengah). *Tesis, Magister Manajemen* Universitas Tadulako, Palu.
- Oktriniatmaja, Rini. 2011. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara. *Tesis, Magister Manajemen* Universitas Sebelas Maret.
- Pelealu, A. M. (2014). "Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Modal Pemerintah Kota Manado Tahun 2003-2012". *Jurnal EMBA*, 1191 Vol.1 No.4 Desember, Hal. 1189-1197. ISSN 2303-1174.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 *tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*

- Rusiadi, (2014) *Metode Penelitian Administrasi*. Penerbit Alfabeta Bandung.
- Saraswati, D. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Dana Perimbangan sebagai Pemoderasi di Kabupaten/Kota Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 8(2), 54-68.
- Saraswati, D. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Leverage, Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 9(2), 110-120.
- Sari, A. K., Saputra, H., & Siahaan, A. P. U. (2017). *Effect of Fiscal Independence and Local Revenue Against Human Development Index*. *Int. J. Bus. Manag. Invent*, 6(7), 62-65.
- Sari, M. N. (2018). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Underpricing Saham pada Saat Initial Public Offering di Bursa Efek Indonesia.
- Sirait (2009) *Ilmu Makro Ekonomi, Edisi 17(terjemahan)*. Penerbit Media Global Edukasi. Jakarta
- Siregar, O. K. (2019). Pengaruh Deviden *Yield* Dan *Price Earning Ratio* Terhadap Return Saham Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016 Sub Sektor Industri Otomotif. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 9(2), 60-77.
- Subekan, (2012) *Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta
- Supraja, G. (2019). Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaL Dan Efektivitas Fungsi Pengawasan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 10(1), 115-130.
- Syamsinar. (2013). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Terhadap Terhadap Anggaran Belanja Modal Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau. *Jurnal Akuntansi* .
- Tahar Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kemandirian Daerah Dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah *Jurnal Akuntansi dan Investasi* Vol. 12. 2011
- Vanessa,(2019) Teori Pertumbuhan Ekonomi, *Jurnal Paradigma Ekonomika* Vol. 14. No. 1 Edisi 1. BPF. Yogyakarta.

Wandira. (2013). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Pengalokasian Belanja Modal*

Yaser (2015) *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit Andi : Yogyakarta.

Yunus, R. N. (2019). Kemampuan Menulis Argumentasi Dalam Latar Belakang Skripsi Mahasiswa Manajemen Universitas Pembangunan Panca Budi. *Jumant*, 11(1), 207-216.